

Laporan

NATIONAL KAWULA17 SURVEY (NKS) Q1 2026

Kinerja Pemerintah dan Legislatif
serta Opini Masyarakat



Daftar Isi

Perkenalan.....	3
Metodologi.....	6
Temuan.....	9
Isu Prioritas.....	20
Penilaian Kinerja Pemerintah.....	26
Ekspektasi terhadap Pemerintahan.....	31
Pantauan Partai Politik.....	42
Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....	48
Persepsi Masyarakat Terhadap Hubungan Internasional....	53
Lampiran.....	54



Sumber: Storyset



Perkenalan



Sumber: Storyset

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas

Apa itu Yayasan PP17?

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi orang muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga tentang memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi orang muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya adalah **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan di tiap kuartal untuk memantau posisi partai politik dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini. Pemantauan reguler ini dilakukan untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa memeriksa pilihan partai politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai politik pemilih berdasarkan isu sosial ekonomi yang diusung oleh partai tersebut di kurun waktu tertentu. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Secara sederhana, VAA dapat diibaratkan sebagai kuis yang terdiri dari beberapa set pertanyaan yang disediakan bagi para pengguna. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan pada masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**. Posisi-posisi partai teridentifikasi sebagai dasar pembuatan VAA. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik pada masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.



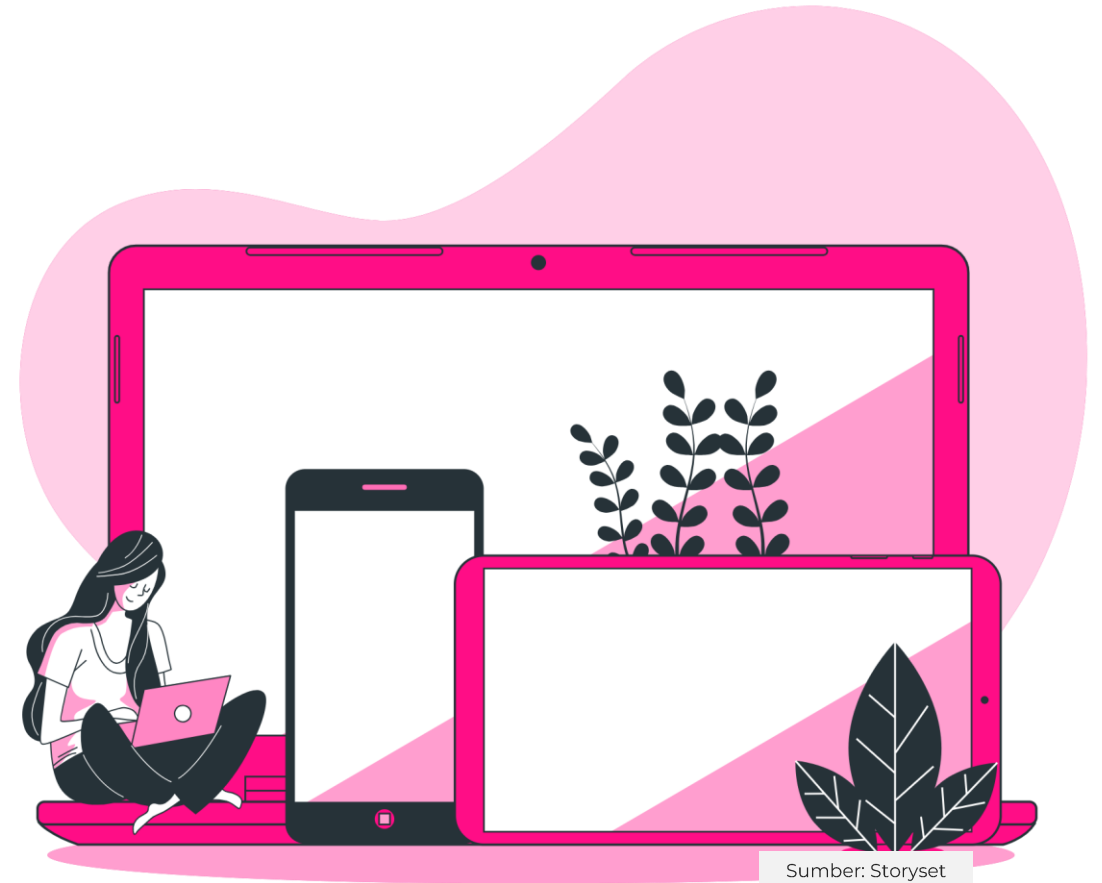
Sumber: Storyset

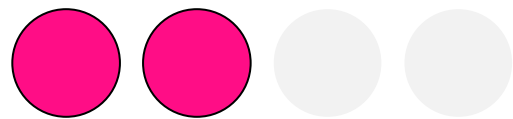
Tentang Survei Nasional Kawula17

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. NKS dilakukan empat kali dalam setahun atau untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat. Publikasi untuk setiap laporan NKS dapat diakses melalui website **Kawula17.id**.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

1. Isu prioritas masyarakat.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintah.
4. Monitoring partai politik.
5. Opini masyarakat terkait beberapa RUU di Prolegnas.
6. Persepsi masyarakat terhadap isu hubungan internasional.





Temuan



Temuan (1)



Isu Prioritas Masyarakat

Terlihat konsistensi prioritas isu terkait perekonomian bagi masyarakat sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu ekonomi secara konsisten menjadi salah satu topik teratas bagi masyarakat sejak Q1 2025 hingga Q1 2026. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam membaca situasi nasional.

Kekhawatiran tersebut tercermin dalam isu-isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada tiga bulan pembuka tahun 2026, tingginya tingkat pengangguran (45%) menjadi kekhawatiran utama, disusul oleh mahalannya harga pangan dan bahan pokok (43%). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan secara besar, tetapi juga dengan rasa aman terhadap pekerjaan, penghasilan, dan biaya hidup.

Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat juga meluas pada persoalan lingkungan yang dinilai dapat memperburuk tekanan ekonomi dan kualitas hidup dalam jangka panjang. Deforestasi untuk pembukaan lahan sawit di Papua (33%), maraknya proyek tambang yang merusak lingkungan (32%), serta pemulihan wilayah pascabencana di Sumatera (31%) menunjukkan bahwa masyarakat melihat kerusakan lingkungan sebagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan mereka.



Ekspektasi terhadap Pemerintah

Secara umum, keyakinan masyarakat terhadap pemenuhan program Prabowo-Gibran masih terbagi, dengan 38% masyarakat Indonesia merasa (sangat) yakin dan 32% masyarakat yang (sangat) tidak yakin. Penilaian terhadap pemerintah mendapatkan NET Score 6% yang menjadi nilai terendah sejak kepemimpinan Prabowo-Gibran. Karakter Prabowo (46%) terus menjadi alasan utama bagi mereka yang (sangat) yakin terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan mereka yang (sangat) tidak yakin diakibatkan oleh maraknya korupsi oleh pejabat (56%).



Penilaian Kinerja Pemerintah

Pada Q1 2026, kinerja pemerintah tercatat berada di angka 5,4 poin, menurun dibandingkan dengan Q4 2025 yang mencapai 5,7 poin. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Q1 2025), skor masih berada di angka 5,4 poin, yang menunjukkan belum adanya perbaikan kinerja yang signifikan.

Ketidakpuasan masyarakat juga terlihat dalam kebijakan kenaikan gaji ASN (38%) yang terekam sejak dua kuartal sebelumnya, Q3 2025. Selain itu, pemenuhan janji 19 juta lapangan pekerjaan terus menjadi program pemerintahan yang memiliki tingkat kepuasan terendah, dengan 54% masyarakat merasa (sangat) tidak puas.

Temuan (2)



Pantauan Partai Politik

Hasil Survei Nasional Kawula17 Q1 2026 menunjukkan bahwa dukungan terhadap Partai Gerindra turun secara signifikan sebesar -15%, dari 38% pada Q4 2025 menjadi 23% di Q1 2026. Sementara itu, suara terendah dimiliki oleh PKB (3%). Jika pemilu dilaksanakan hari ini, PKB mungkin tidak mendapatkan kursi di parlemen.



Opini Publik terhadap RUU Berjalan

Opini publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berjalan menunjukkan bahwa posisi partai terbagi dalam RUU dengan posisi masyarakat Indonesia. Dari beberapa RUU Prolegnas yang menjadi fokus pada Q1 2026, masyarakat menganggap bahwa aparat kepolisian seharusnya tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil (62%) dan urusan pangan sudah seharusnya melibatkan petani lokal (57%).

Temuan ini menunjukkan bagaimana partai politik belum menunjukkan sikap tegas dalam perancangan UU yang berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat tampak belum sepenuhnya memahami UU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), maka diperlukan edukasi berlanjut mengenai hal tersebut.



Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik pada Q1 2026 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RUU Polri, RUU Pangan, RUU Polri, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemilu, dan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Pada Q1 2026, partai-partai di parlemen memperoleh skor indeks yang cukup rendah. Ini menunjukkan bahwa posisi partai terhadap RUU di atas belum sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Partai Politik	Indeks per kuartal				
	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
Demokrat	33,9	20,5	42,0	37,8	35,5
NasDem	23,1	23,8	28,6	37,8	61,0
PKB	29,8	30,8	39,1	37,6	61,0
PDIP	33,9	43,2	51,2	36,5	28,9
Golkar	33,9	25,0	31,2	36,5	31,1
PKS	34,4	27,8	47,6	35,5	61,1
Gerindra	34,8	25,0	47,6	31,7	46,2
PAN	27,3	20,8	41,9	27,9	35,6

Temuan (3)



Persepsi Masyarakat terhadap Hubungan Internasional

Berdasarkan isu internasional yang sedang ramai dibicarakan, National Kawula17 Survey Q1 2026 memberikan pertanyaan mengenai isu-isu internasional terkait.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa Indonesia perlu mempertahankan prinsip bebas-aktif dalam urusan internasional (57%), Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik AS dan Israel dengan Iran (52%), dan bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain tanpa adanya mandat internasional (50%).

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mendorong Indonesia untuk menjaga posisi yang independen, berhati-hati, dan tidak terlalu jauh terlibat dalam konflik antarnegara. Di tengah situasi global yang semakin kompleks, masyarakat tampaknya masih melihat peran Indonesia lebih relevan sebagai negara yang menjaga prinsip diplomasi dan stabilitas.

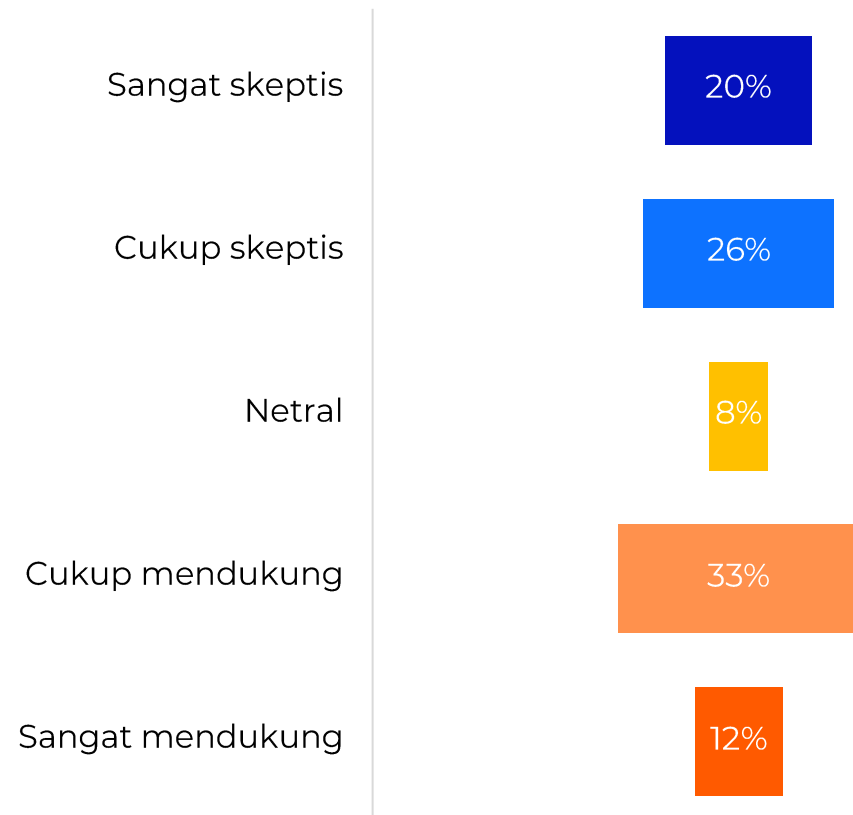


Sumber: Storyset

1 Segmentasi

Spektrum Skeptis-Mendukung Pemerintah

Spektrum Mendukung-Skeptis Pemerintah
base: all, n= 387

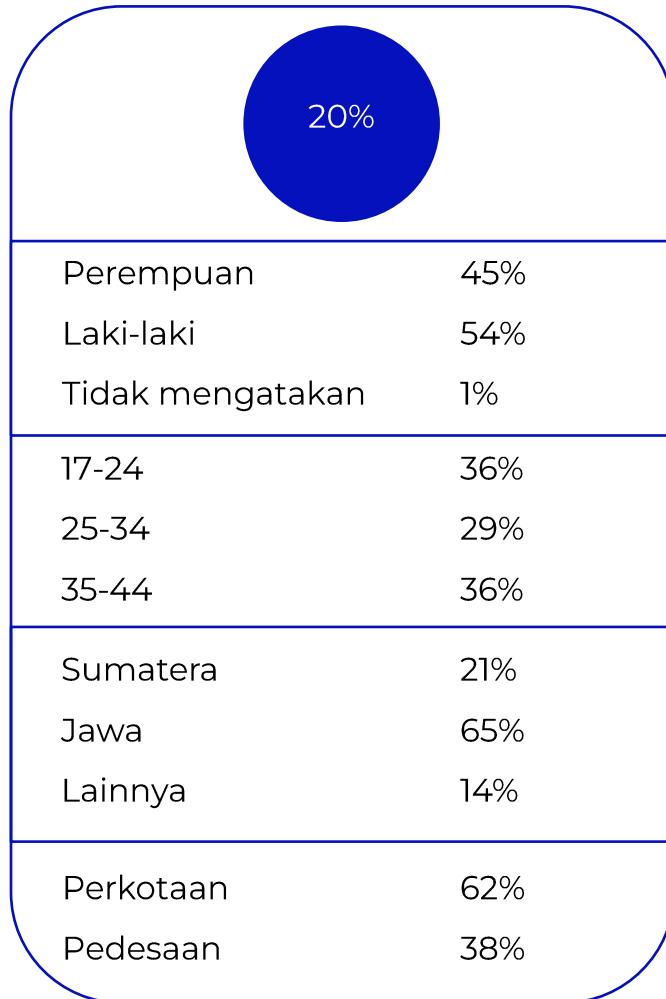


Pengujian skala skeptis-mendukung pemerintah mengidentifikasi lima kelompok utama, yaitu: (1) sangat skeptis, (2) cukup skeptis, (3) netral, (4) cukup mendukung, dan (5) sangat mendukung. Skala ini dibuat berdasarkan posisi masyarakat dalam RUU berjalan, seperti RUU Polri, RUU Pangan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemilu, dan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Skala ini juga dibuat berdasarkan penilaian masyarakat terhadap pemerintah pusat, kinerja pemerintah dalam beberapa topik, tingkat keyakinan terhadap pemenuhan program pemerintah, serta penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis dan Lumbung Pangan.

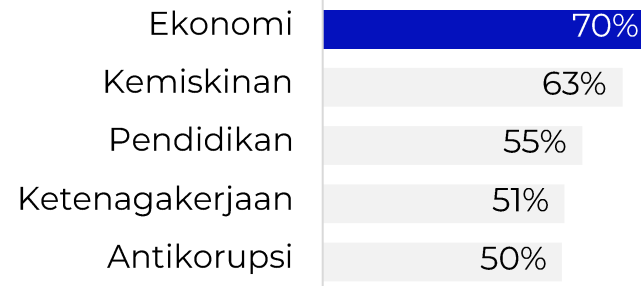
Hasil NKS Q1 2026 menemukan bahwa **semakin skeptis masyarakat, semakin buruk pula penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah.** Sebaliknya, semakin mendukung mereka, semakin bagus penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah. Melalui spektrum ini, terlihat bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sikap mereka terhadap arah kebijakan, program, dan isu-isu prioritas nasional. Pemetaan ini membantu menunjukkan bagaimana posisi skeptis hingga mendukung membentuk cara masyarakat menilai kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Sangat skeptis

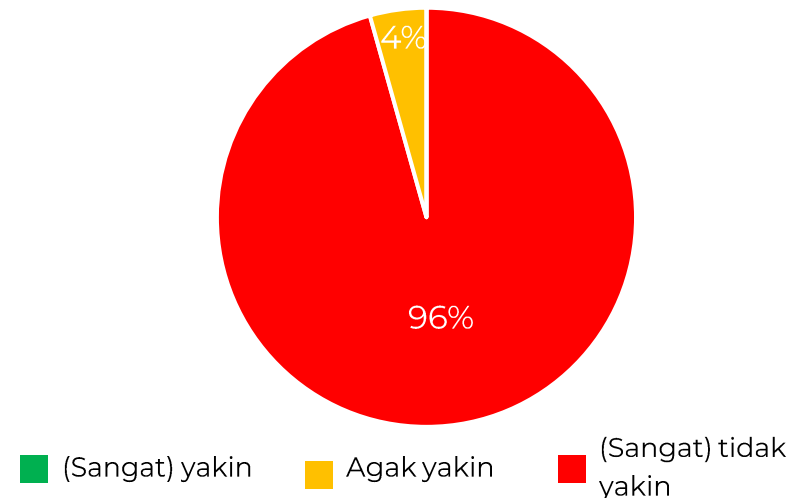
Demografi & profil Sangat skeptis



Topik prioritas base: Sangat skeptis, n= 77



Keyakinan terhadap pemerintah base: Sangat skeptis, n= 77



Isu prioritas base: Sangat skeptis, n= 77

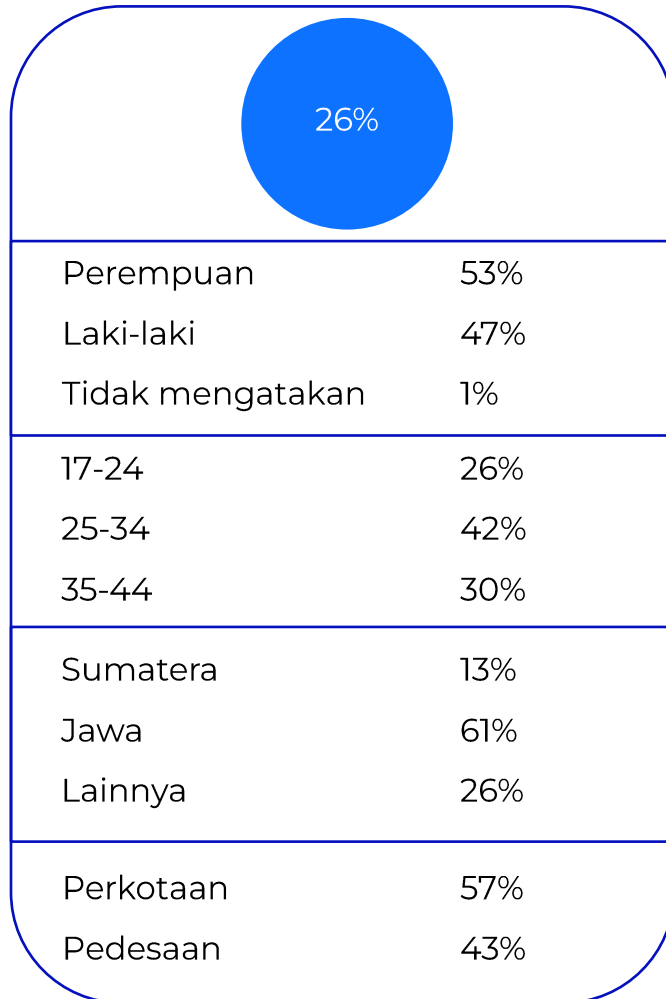
Isu yang perlu segera diselesaikan	
Mahalnya bahan pokok	47%
Anggaran MBG terlalu besar	46%
Tingkat pengangguran tinggi	41%
Maraknya kasus keracunan MBG	39%
Penonaktifan BPJS Kesehatan	39%

Isu lingkungan prioritas base: Sangat skeptis, n= 77

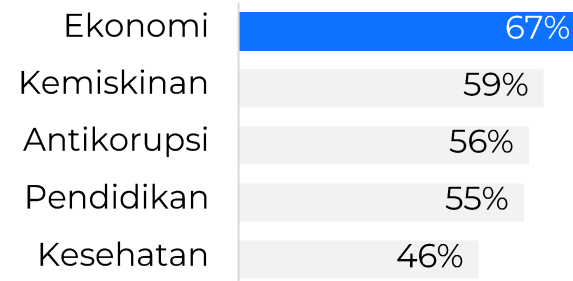
Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pembukaan hutan untuk sawit	38%
Perampasan hutan adat utk PSN	35%
Proyek tambang yang merusak	33%
Pemulihan daerah pasca bencana	28%
Deforestasi dan ahli fungsi hutan	28%

Cukup skeptis

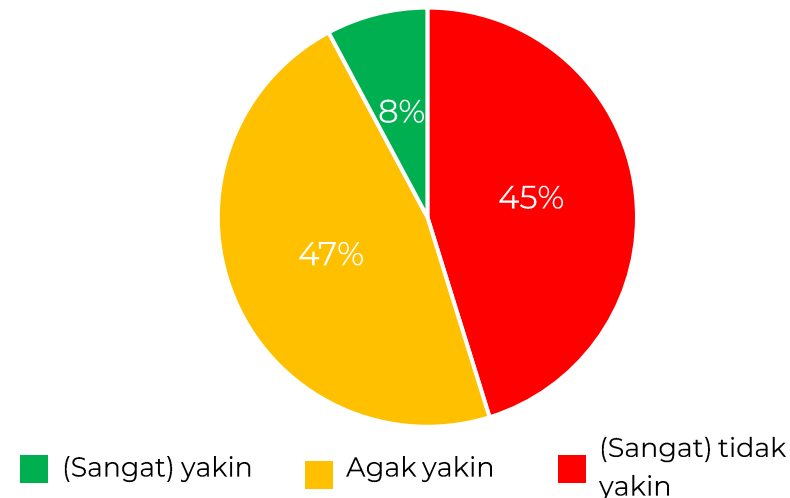
Demografi & profil cukup skeptis



Topik prioritas base: cukup skeptis, n= 100



Keyakinan terhadap pemerintah base: cukup skeptis, n= 100



Isu prioritas base: cukup skeptis, n= 100

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Tingkat pengangguran tinggi	48%
Mahalnya harga bahan pokok	45%
Penonaktifan BPJS Kesehatan	38%
Maraknya kasus keracunan MBG	37%
Anggaran MBG terlalu besar	32%

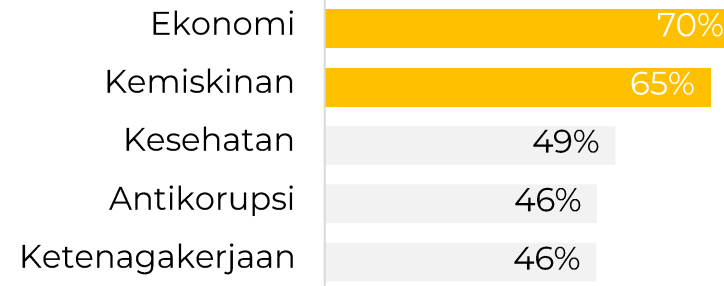
Isu lingkungan prioritas base: cukup skeptis, n= 100

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pembukaan hutan untuk sawit	35%
Pemulihan daerah pasca bencana	32%
Proyek tambang yang merusak	31%
Deforestasi dan ahli fungsi hutan	29%
Inefisiensi pengelolaan sampah	28%

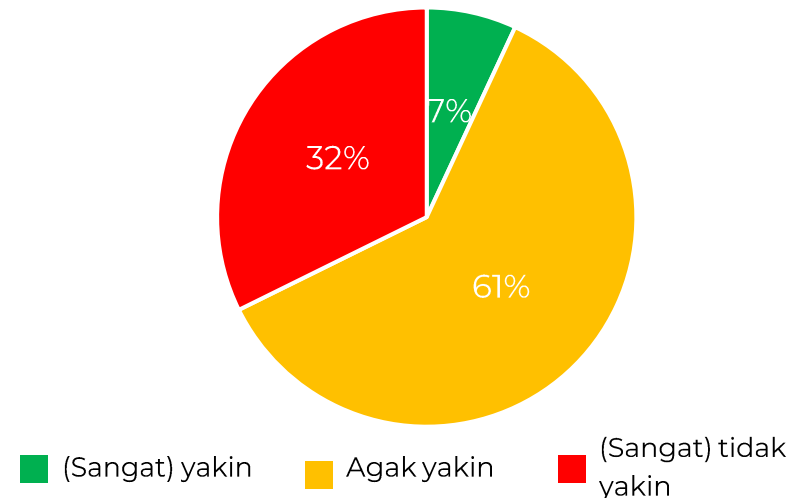
Demografi & profil Netral

8%	
Perempuan	41%
Laki-laki	59%
Tidak mengatakan	0%
17-24	26%
25-34	37%
35-44	37%
Sumatera	20%
Jawa	54%
Lainnya	26%
Perkotaan	46%
Pedesaan	54%

Topik prioritas base: netral, n= 34



Keyakinan terhadap pemerintah base: netral, n= 34



Isu prioritas base: netral, n= 34

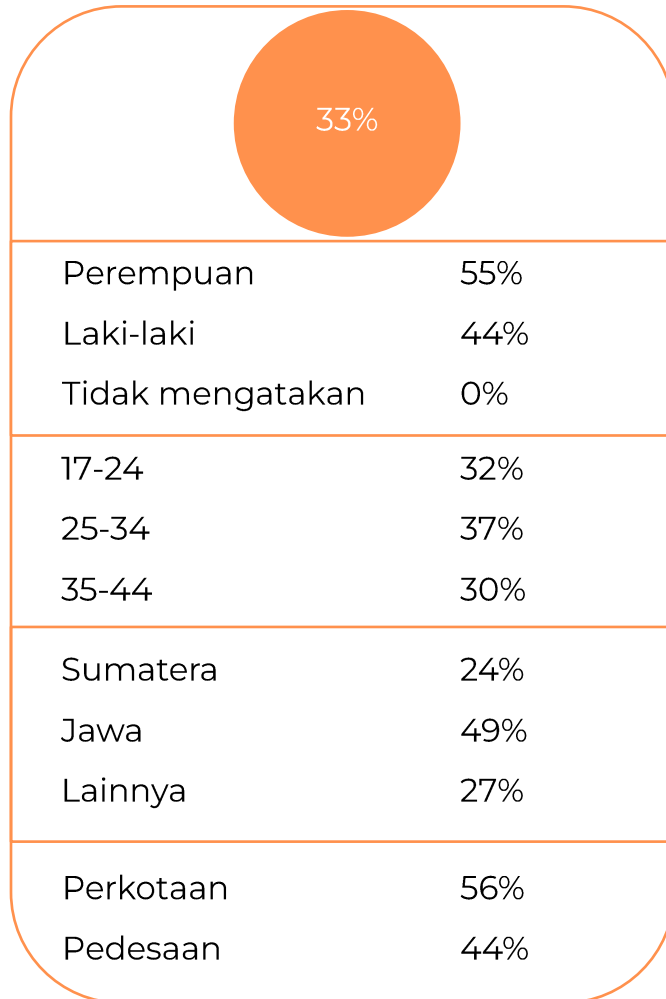
Isu yang perlu segera diselesaikan	
Tingkat pengangguran tinggi	49%
Anggaran MBG terlalu besar	43%
Penonaktifan BPJS Kesehatan	37%
Mahalnya harga bahan pokok	37%
Maraknya kasus keracunan MBG	27%

Isu lingkungan prioritas base: netral, n= 34

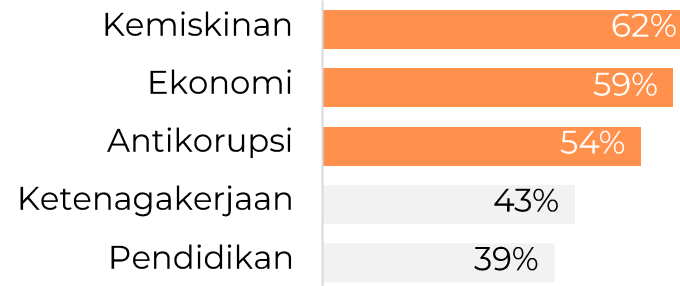
Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Inefisiensi pengelolaan sampah	40%
Perampasan hutan adat utk PSN	30%
Proyek tambang yang merusak	27%
Pembukaan hutan untuk sawit	26%
Pencemaran akibat limbah industri	25%

Cukup mendukung

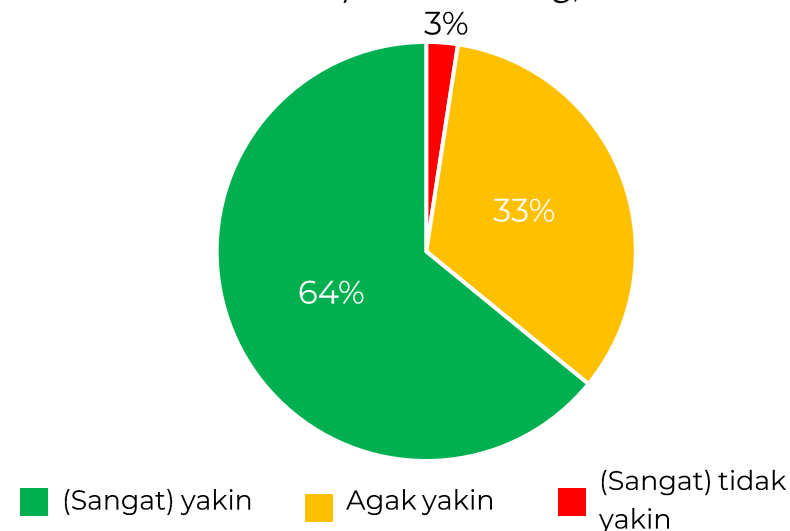
Demografi & profil Cukup mendukung



Topik prioritas base: Cukup mendukung, n= 123



Keyakinan terhadap pemerintah base: Cukup mendukung, n= 123



Isu prioritas base: Cukup mendukung, n= 123

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Tingkat pengangguran tinggi	50%
Maraknya kasus keracunan MBG	42%
Mahalnya harga bahan pokok	39%
Penonaktifan BPJS Kesehatan	35%
Anggaran MBG terlalu besar	28%

Isu lingkungan prioritas base: Cukup mendukung, n= 123

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pemulihan daerah pasca bencana	32%
Inefisiensi pengelolaan sampah	32%
Proyek tambang yang merusak	30%
Pembukaan hutan untuk sawit	29%
Banjir dan air rob	29%

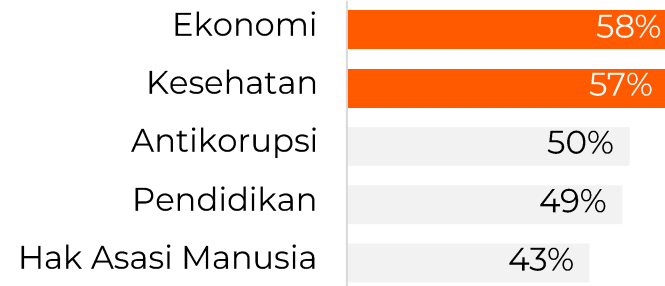
Sangat mendukung

Demografi & profil Sangat mendukung



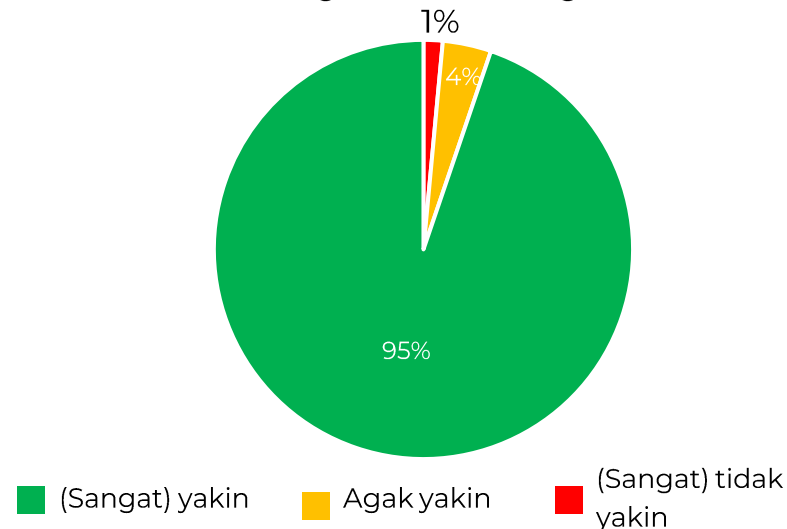
Topik prioritas

base: Sangat mendukung, n= 53



Keyakinan terhadap pemerintah

base: Sangat mendukung, n= 53



Isu prioritas

base: Sangat mendukung, n= 53

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Mahalnya harga bahan pokok	50%
Maraknya kasus keracunan MBG	46%
Tingkat pengangguran yang tinggi	34%
Keikutsertaan dalam BoP	31%
Penonaktifan BPJS Kesehatan	27%

Isu lingkungan prioritas

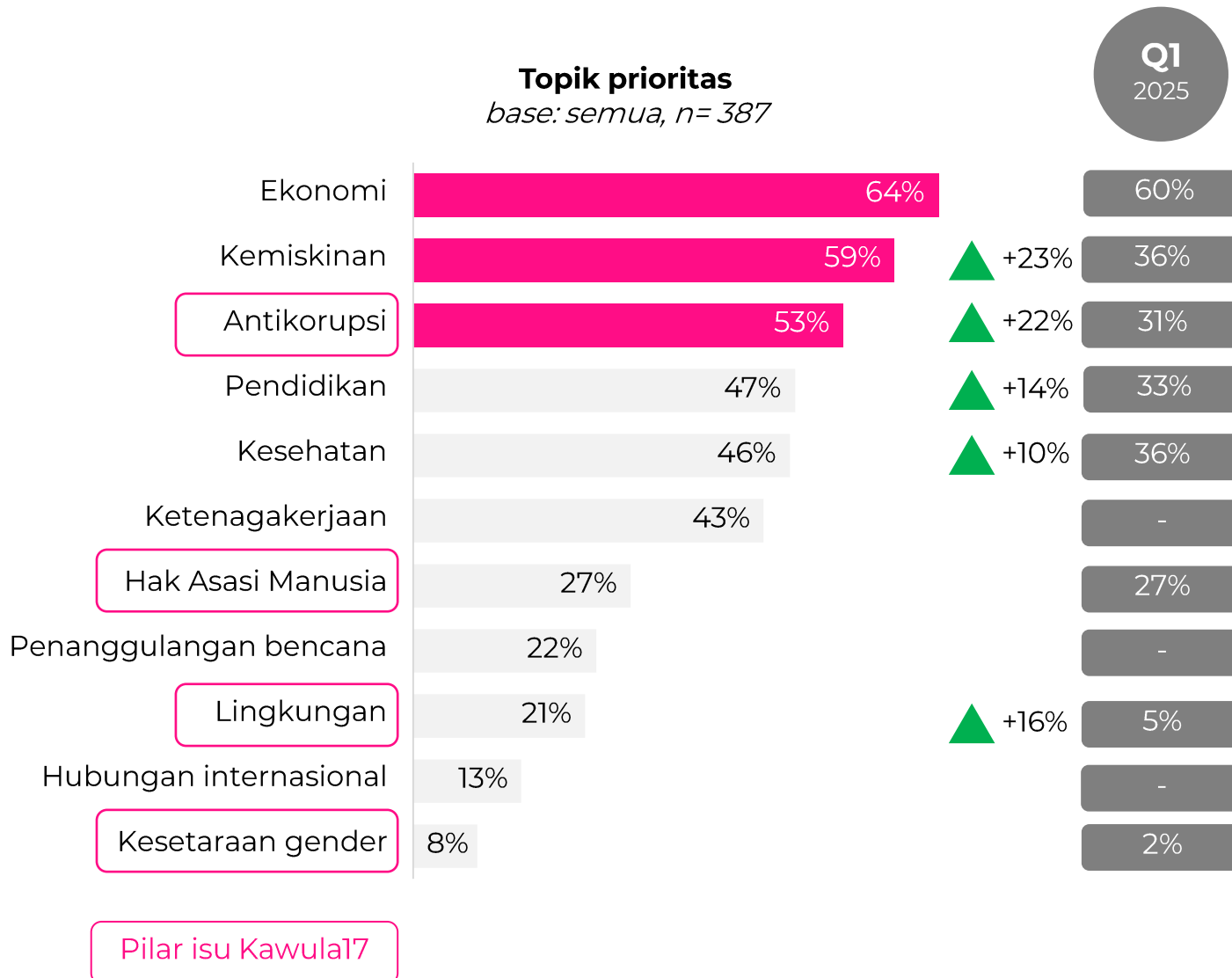
base: Sangat mendukung, n= 53

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Proyek tambang yang merusak	39%
Pemulihan daerah pasca bencana	38%
Pembukaan hutan untuk sawit	34%
Pencemaran akibat limbah industri	27%
Cuaca ekstrem	26%



2 Isu Prioritas

Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Q1 2026 semakin memburuk dibandingkan dengan awal pemerintahan Prabowo-Gibran.



Topik ekonomi menjadi prioritas secara signifikan oleh mereka yang memiliki pendidikan terakhir SMP/SMA sederajat (67%).

Topik kemiskinan menjadi prioritas secara signifikan bagi mereka yang memiliki pendidikan SMP/SMA sederajat (61%) dan mereka yang tinggal di Jawa (67%).

Topik antikorupsi dianggap penting secara signifikan oleh mereka yang tinggal di pedesaan (61%) dan mereka yang memiliki SES B (58%).

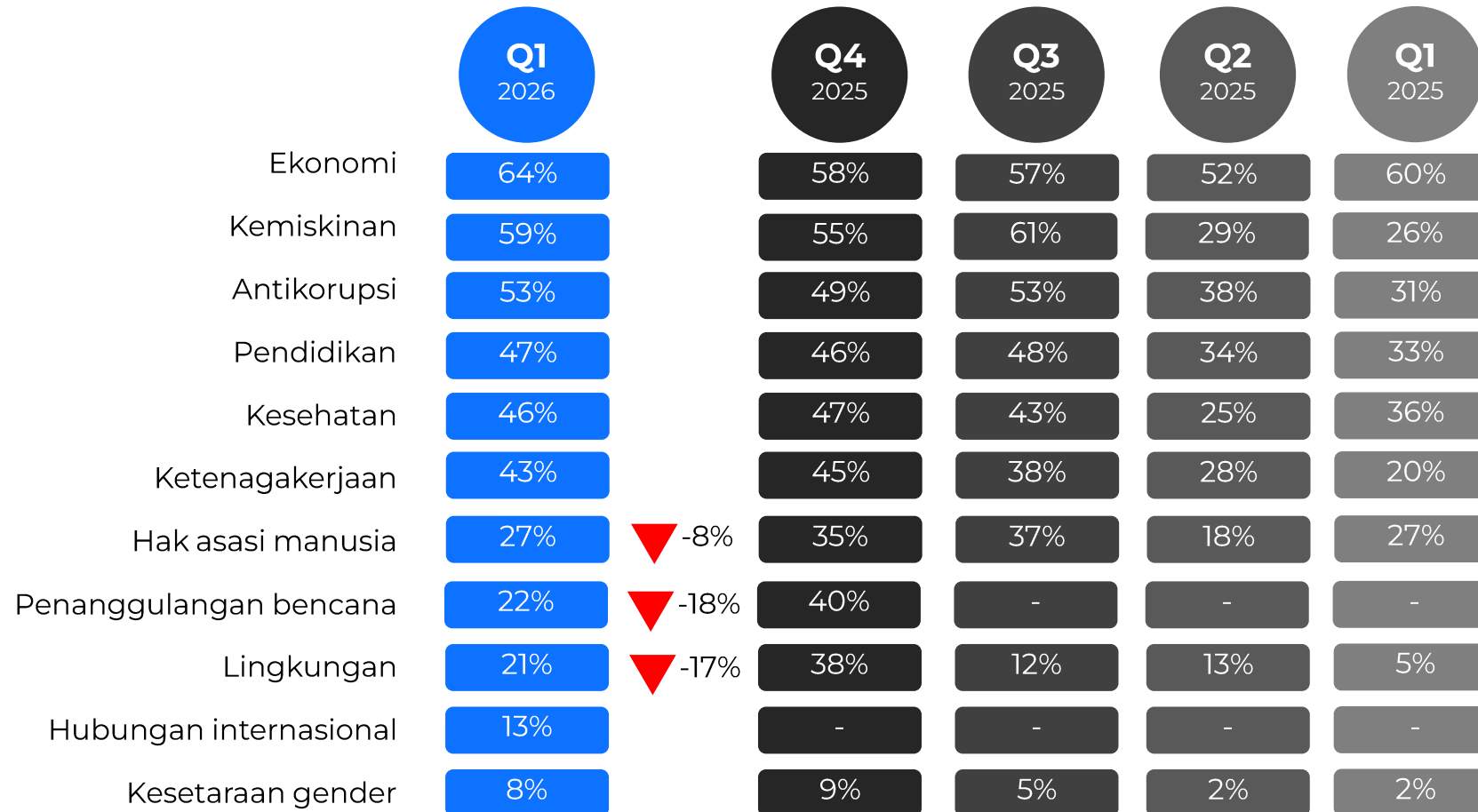
Nice to know

Data Bank Indonesia (2026) menunjukkan sepanjang Januari – Desember 2025, indeks keyakinan konsumen mengalami penurunan 3,5 poin. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat lebih rendah, yang dikarenakan adanya perlambatan ekonomi dan penurunan lapangan pekerjaan.

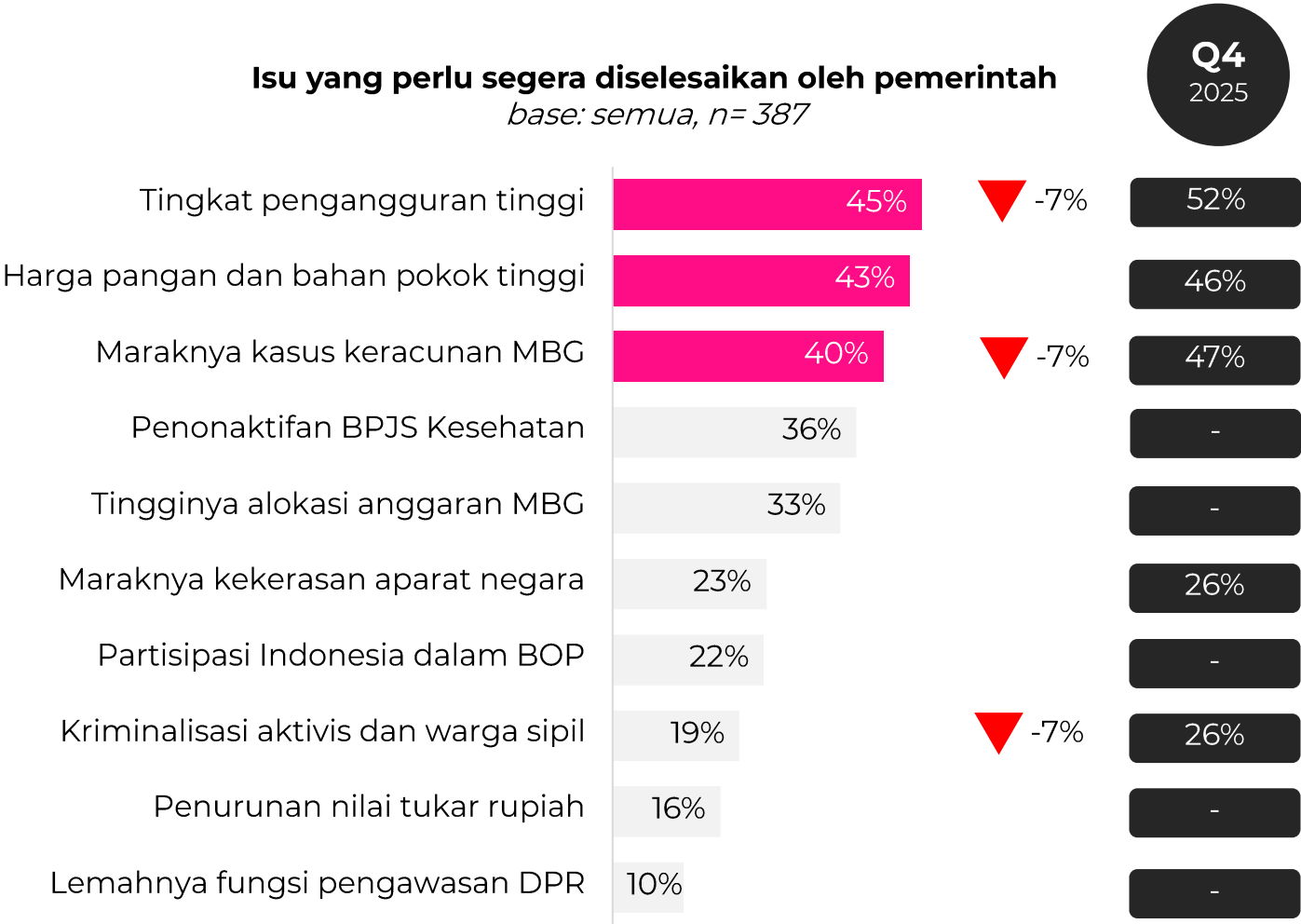
Dari kuartal ke kuartal, topik ekonomi konsisten sebagai topik yang paling dikhawatirkan dan menjadi prioritas utama masyarakat.

Topik prioritas per kuartal

base: semua, n= variasi



Sejalan dengan topik ekonomi, pengangguran (45%) dan harga pangan (43%) menjadi isu mendesak yang harus diselesaikan pemerintah.



Mahalnya harga pangan dan bahan pokok
dianggap penting secara signifikan oleh mereka dengan pendidikan SMP/SMA sederajat (47%)

Nice to know

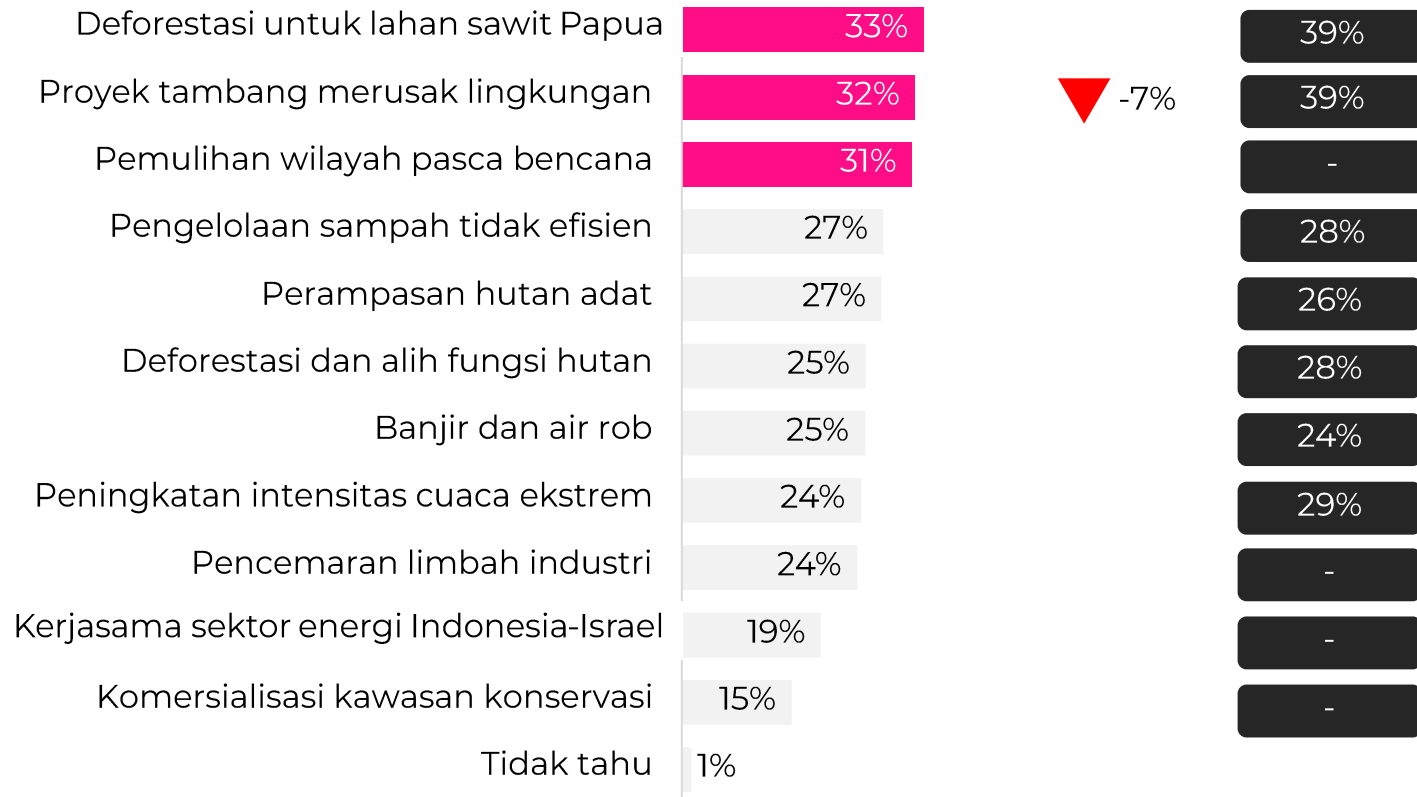
Tingginya harga pangan dan bahan pokok yang menjadi kekhawatiran masyarakat merupakan **cerminan dari meningkatnya inflasi** menurut Bank Indonesia (2026) yang dimulai dari bulan Januari 2025 (0,76%) hingga bulan Januari 2026 dengan angka 3,55% (+2,79%), **menunjukkan peningkatan harga yang cukup tajam dari tahun ke tahun.**

Kekhawatiran masyarakat meluas ke isu lingkungan, dari perluasan sawit di Papua (33%), proyek tambang (32%), hingga pemulihan wilayah pascabencana (31%).

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan pemerintah

base: semua, n= 387

Q4
2025



Pemulihan wilayah Sumatera pasca banjir dinilai penting secara signifikan oleh mereka dengan pendidikan perguruan tinggi (45%).

Banjir dan air rob dinilai penting secara signifikan oleh mereka dengan pendidikan SMP/SMA sederajat (27%) dan SES D (45%).

Pengelolaan sampah yang tidak efisien dinilai penting secara signifikan oleh masyarakat pedesaan (35%).

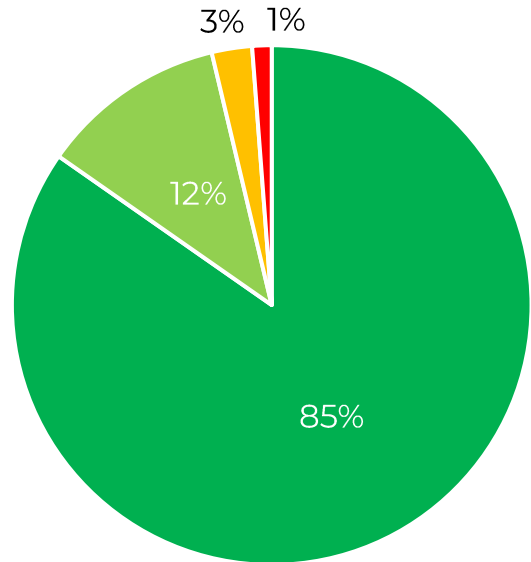
Nice to know

Satgas Penertiban Kawasan Hutan mencatat **proyek tambang ilegal yang tersebar sebanyak 198 titik** di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara dari 75 korporasi tambang ilegal. PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2026) mengungkap **total perputaran dana sebesar Rp 992 triliun yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.**

Sebagian besar masyarakat tetap ingin menggunakan suaranya pada Pemilu dan Pilkada selanjutnya.

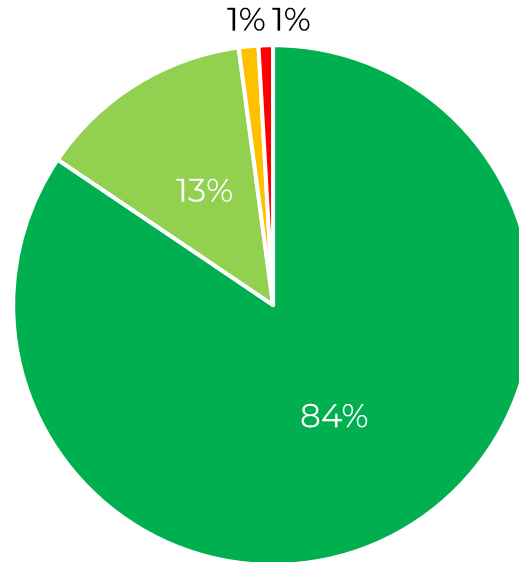


Rencana Mengikuti Pemilu 2029
base: semua, n= 387



■ Ya, pasti akan memilih
■ Mungkin akan memilih

Rencana Mengikuti Pilkada Mendatang
base: semua, n= 387



■ Belum memutuskan
■ Tidak akan memilih

Masyarakat di luar pulau Jawa dan Sumatera (96%) secara signifikan **pasti akan memilih dalam Pemilu selanjutnya.**

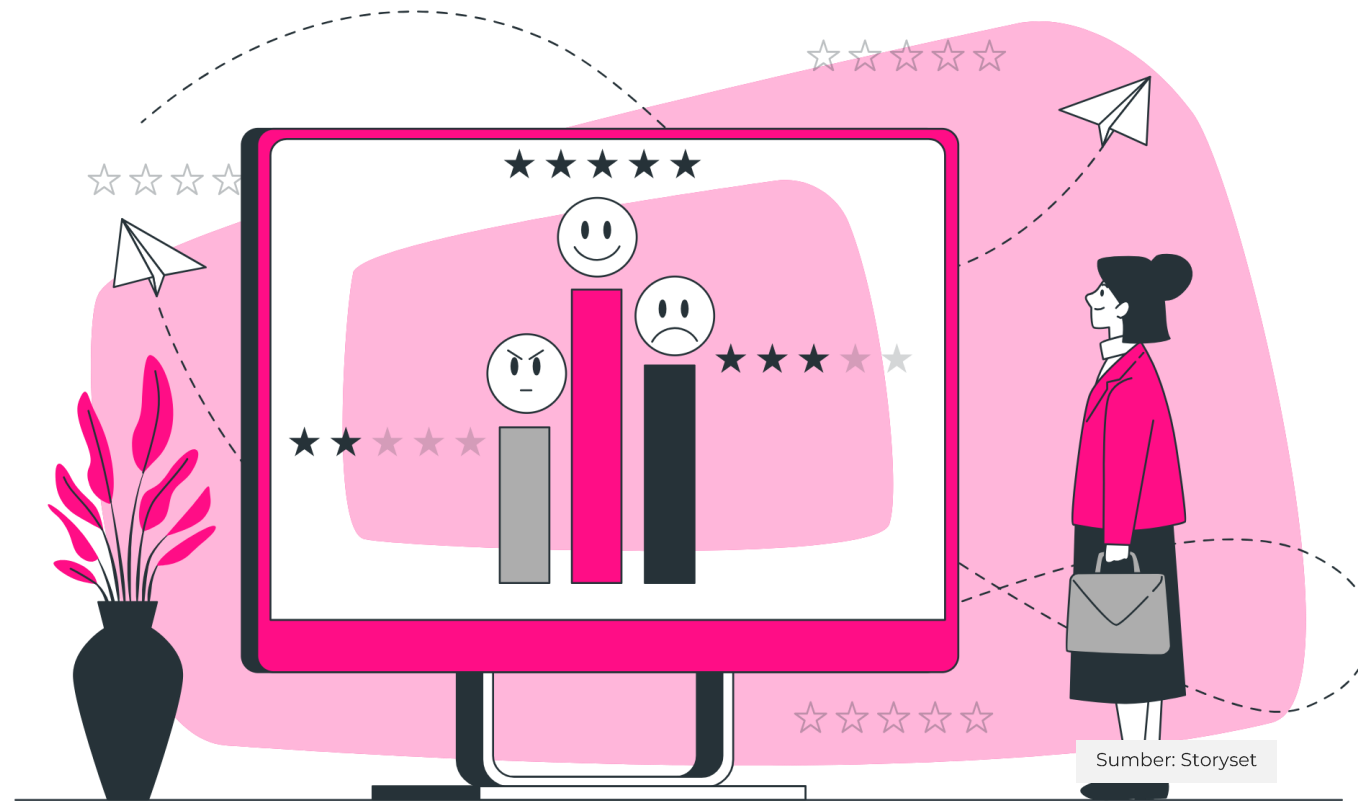
Mereka yang (sangat) skeptis (22%) secara signifikan **mungkin akan memilih dalam Pemilu selanjutnya.**

Mereka yang termasuk dalam kategori SES B (80%) secara signifikan **pasti akan memilih dalam Pilkada selanjutnya.**

Mereka yang (sangat) skeptis (24%) secara signifikan **mungkin akan memilih dalam Pilkada selanjutnya.**

Nice to know

Pada awal tahun 2026, terdapat wacana yang dikeluarkan beberapa partai politik untuk mengubah sistem Pemilihan Kepala Daerah (**Pilkada**) **menjadi tindak langsung**, dengan kepala daerah dipilih melalui DPRD, daripada dipilih langsung oleh masyarakat.

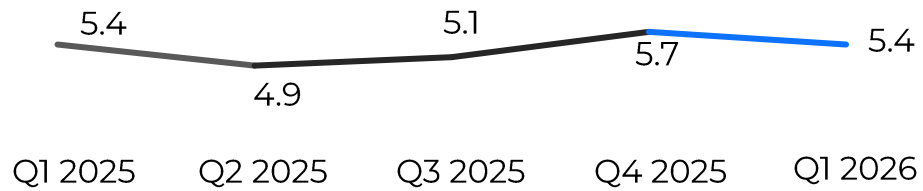


3 Penilaian Kinerja Pemerintah

Setelah penilaian yang naik-turun sepanjang 2025, skor penilaian masyarakat terhadap pemerintah kembali berada pada skor 5,4 (dari skala 1-10).

Tren Kinerja Pemerintah*

base: semua, n= variasi

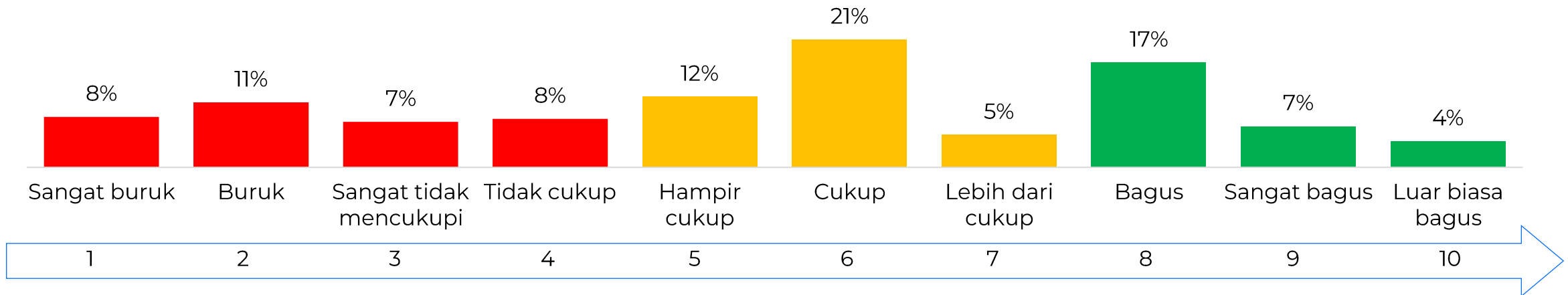


Nice to know

Berdasarkan data Chandler Good Government Index 2025, **skor** efektivitas dan **kapabilitas pemerintahan Indonesia berada pada angka 0,57 (skala 0-1)**, masih di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura (0,87) dan Malaysia (0,59).

Kinerja Pemerintah

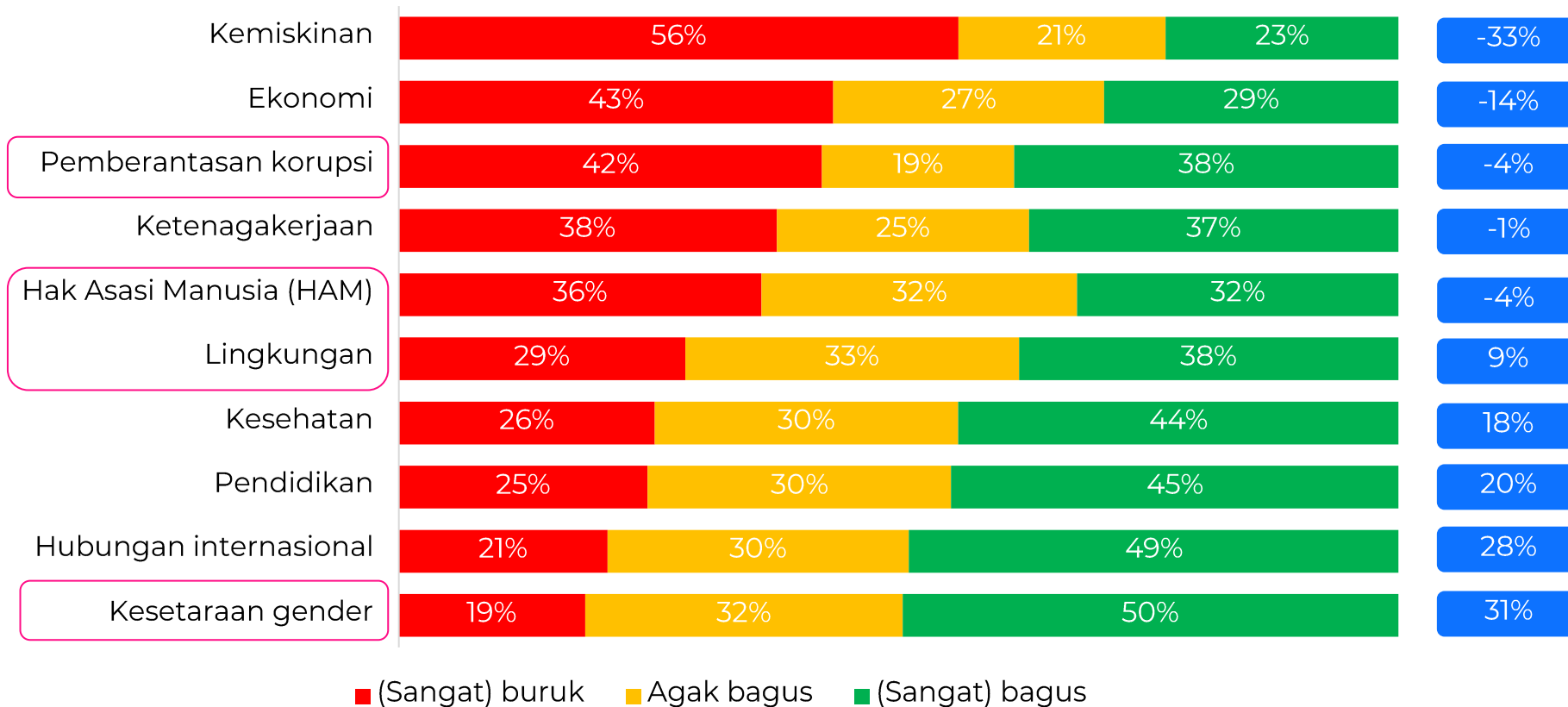
base: semua, n=387



Masyarakat perkotaan cenderung lebih skeptis dalam menilai kinerja pemerintah, ditunjukkan dengan penilaian mereka yang (sangat) buruk terhadap berbagai isu.

Kinerja pemerintah base: semua, n=387

NET Score*

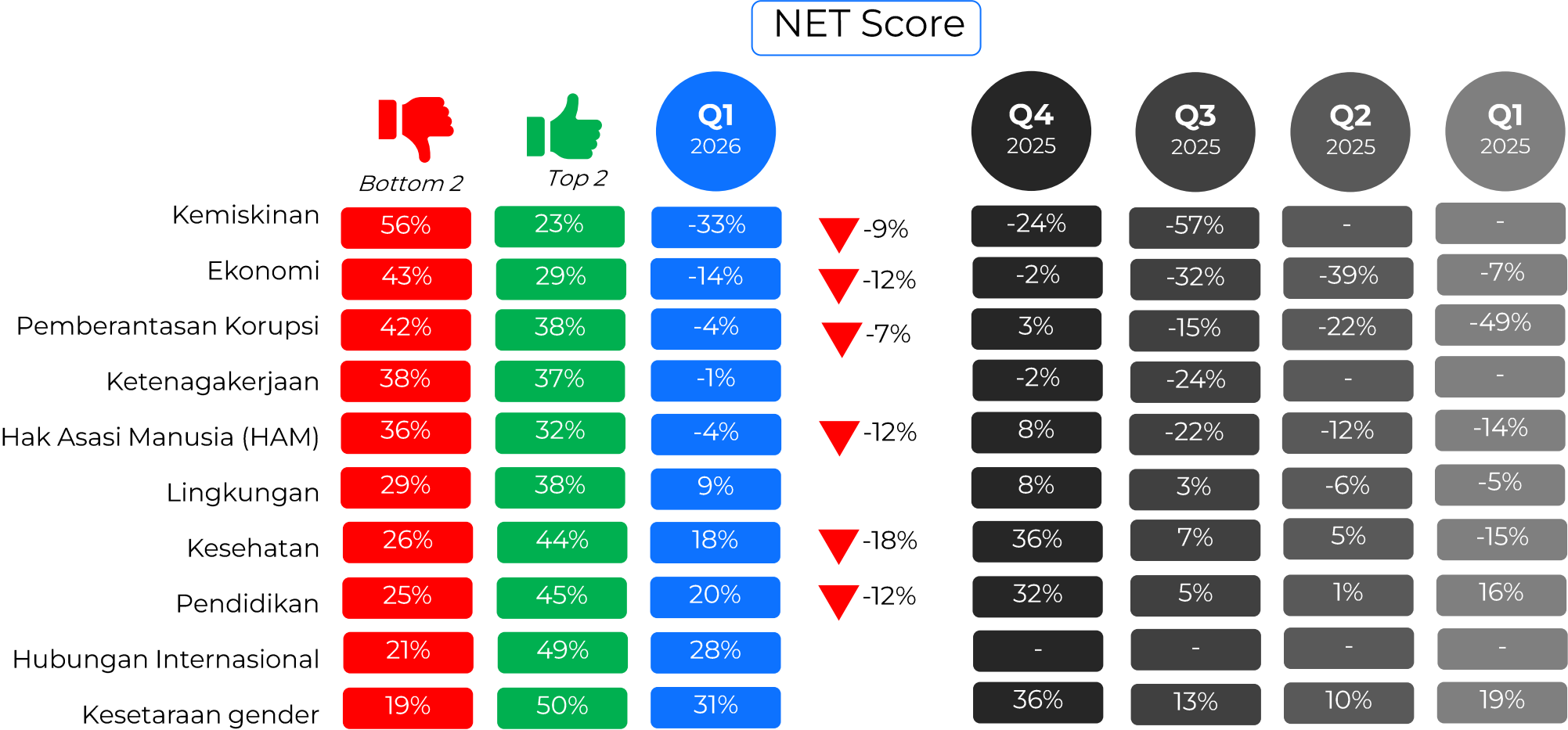


Antikorupsi dinilai (sangat) buruk, secara signifikan bagi mereka yang di perkotaan (48%), sedangkan mereka yang di pedesaan (46%) secara signifikan menilai antikorupsi (sangat) bagus.

Kinerja dalam **kesetaraan gender** secara signifikan dinilai (sangat) buruk oleh kategori usia 17-24 tahun (29%) dan mereka yang tinggal di perkotaan (24%).

Pilar isu Kawula17

Ekonomi dan kemiskinan menjadi topik yang dinilai semakin buruk jika dibandingkan dengan Q4 2025.





Sumber: Storyset

4 Ekspektasi terhadap Pemerintah

Program *Quick Win* Pemerintah

Pemerintah menetapkan sejumlah program hasil terbaik cepat (*quick win*) di dalam dokumen visi misinya. Program-program tersebut adalah:

Makan Bergizi Gratis

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren, yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ketika ulang tahun, serta untuk anak sekolah dan ibu hamil

Food Estate

Program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekolah Unggulan Garuda

Program ini merupakan inisiatif untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai daerah, yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pencetakan lulusan berdaya saing global.



Kartu Kesejahteraan Sosial

Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga penyalurannya lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau langsung keluarga prasejahtera.

Menaikkan Gaji ASN

Kebijakan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, infrastruktur energi dan digital.

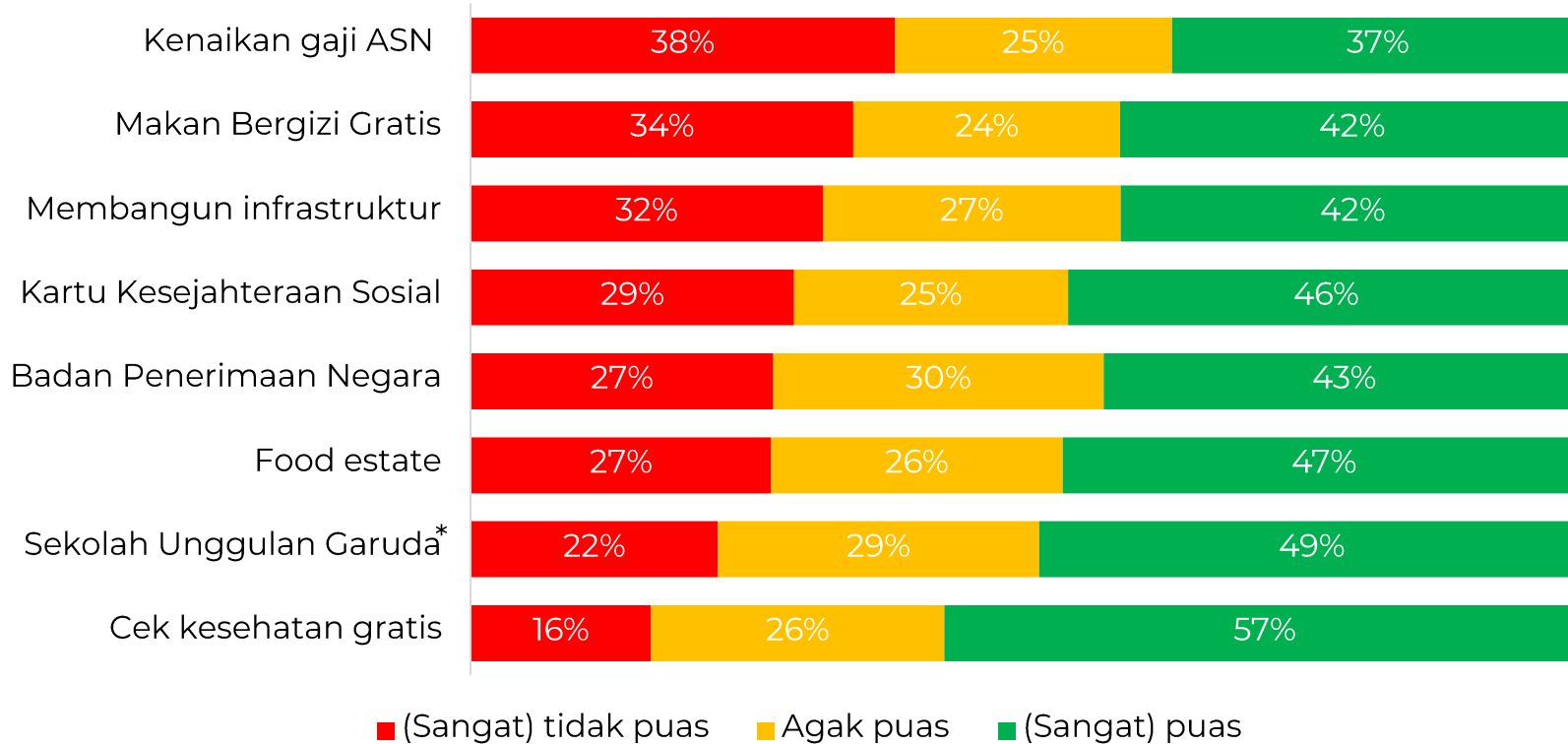
Badan Penerimaan Negara

Pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah langkah restrukturisasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di tengah kritik terhadap beberapa program, cek kesehatan gratis tetap menjadi program yang paling diapresiasi.

Kepuasan Program Quick-win Pemerintah

base: semua, n= variasi

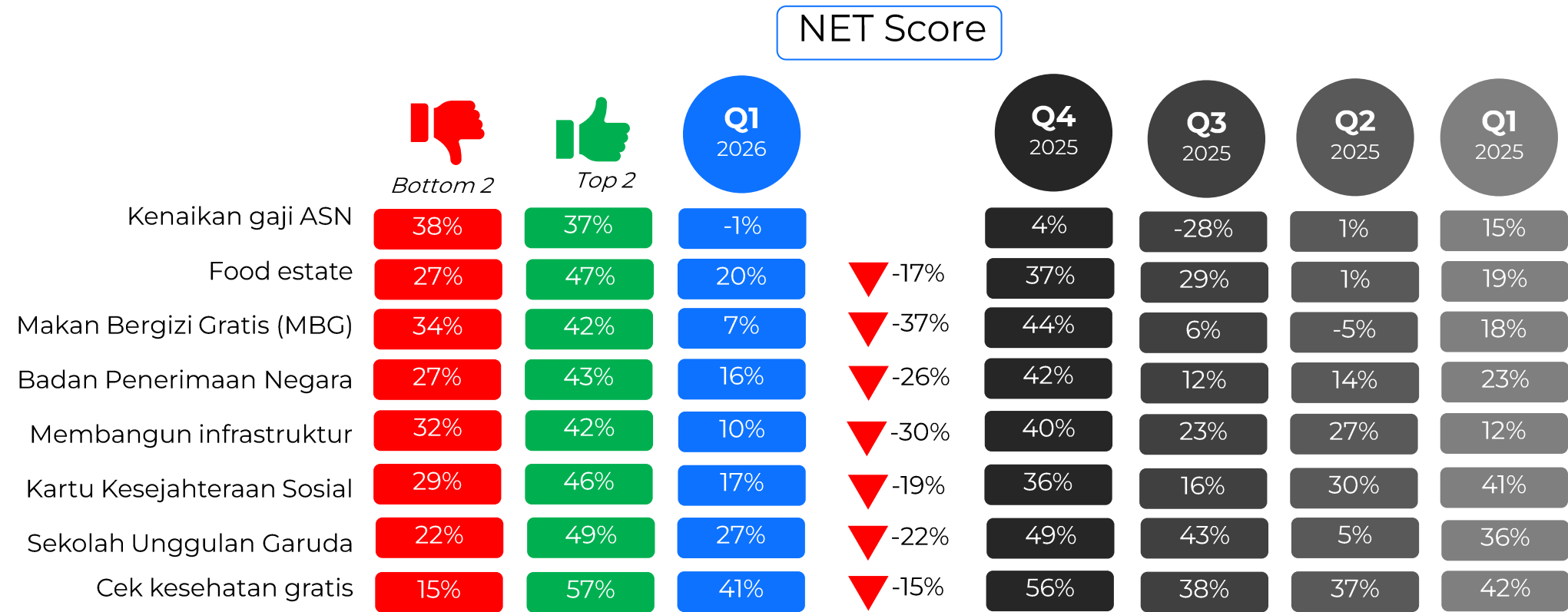


Program perluasan **kartu kesejahteraan sosial** dinilai agak puas secara signifikan oleh mereka yang berusia 25-34 tahun (33%).

***Program sekolah unggulan** dinilai (sangat) tidak puas secara signifikan oleh mereka yang tinggal di daerah perkotaan (25%) dan (sangat) puas secara signifikan bagi masyarakat pedesaan (54%).

Masyarakat perkotaan (39%) dan mereka yang Sangat skeptis (91%) secara signifikan (sangat) tidak puas dengan **MBG**.

Skor bersih (NET score) kepuasan masyarakat mengalami penurunan signifikan dalam mayoritas program *quick-win*.



Program Terkini Pemerintah (1)



Berikut beberapa program dan kebijakan pemerintah yang terekam dalam National Kawula17 Survey Q1 2026:

Keterlibatan Indonesia dalam BoP

Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump sebagai upaya penghentian konflik di Gaza, Palestina, dan mewujudkan solusi dua negara (*two-state solution*).

Perjanjian tarif dagang dengan AS

Pemerintah resmi menyepakati Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat pada Februari 2026 untuk mengamankan daya saing ekspor nasional dengan menjamin Tarif Resiprokal nol persen bagi komoditas unggulan Indonesia.

Pengiriman militer ke Gaza, Palestina

Sekitar 8 ribu anggota TNI akan dikirim ke Gaza, Palestina sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) untuk misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian di wilayah konflik.

Mediator konflik AS & Israel dengan Iran

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran untuk memulihkan kondisi keamanan di kawasan Teluk dan Asia Barat.

Penurunan batas penghasilan zakat

Baznas menetapkan batas minimal penghasilan wajib zakat (nisab) pada tahun 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan. Angka ini naik 7% dari tahun sebelumnya, menyesuaikan kenaikan rata-rata upah tahunan dan harga emas 2025.

Impor mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India yang akan digunakan sebagai sarana operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Perluasan Perkebunan sawit di Papua

Penanaman kelapa sawit di Papua didorong untuk mempercepat swasembada energi daerah saat pengarahannya kepada kepala daerah seluruh daerah Papua.

Penciptaan 19 juta lapangan kerja

Pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun untuk menjaga angka pengangguran agar tidak bertambah seiring dengan pertambahan rata-rata angkatan kerja baru.

Program Terkini Pemerintah (2)



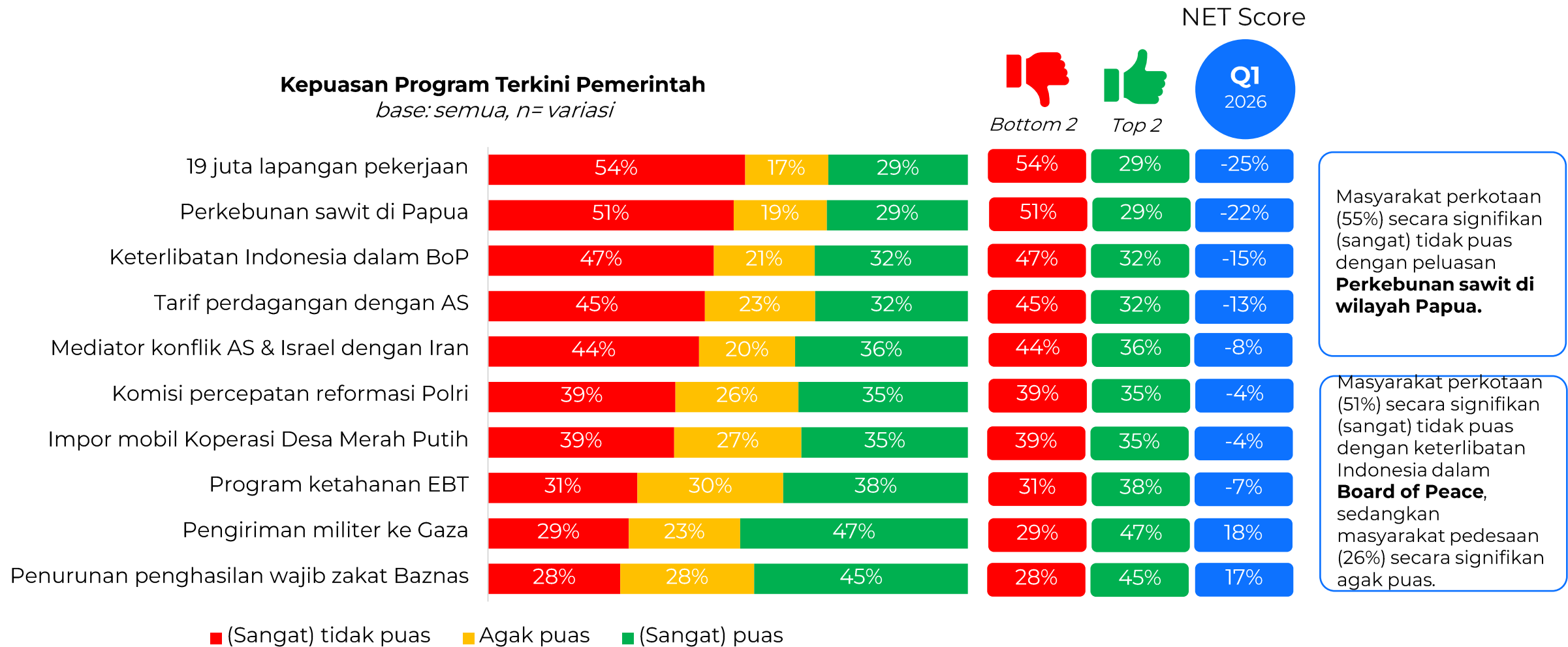
Ketahanan energi baru terbarukan

Ketahanan energi menjadi agenda prioritas pada 2026. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal yang diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan sektor energi baru dan terbarukan.

Komisi percepatan reformasi Polri

Komisi ini bertugas mempercepat proses reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, dan memperbaiki tata kelola di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya komisi ini, pemerintah ingin memastikan Polri menjadi institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Program 19 juta lapangan kerja (-25%) dan perkebunan sawit di Papua (-22%) mendapatkan NET score terendah di Q1 2026.

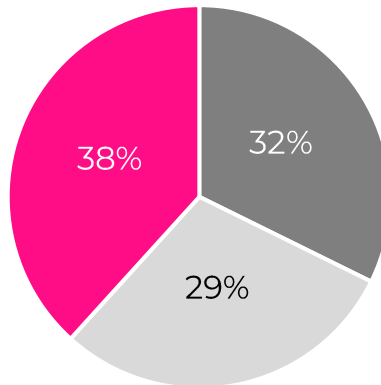


Keyakinan masyarakat terhadap pemerintah turun ke titik terendah sejak awal kepemimpinan Prabowo-Gibran.



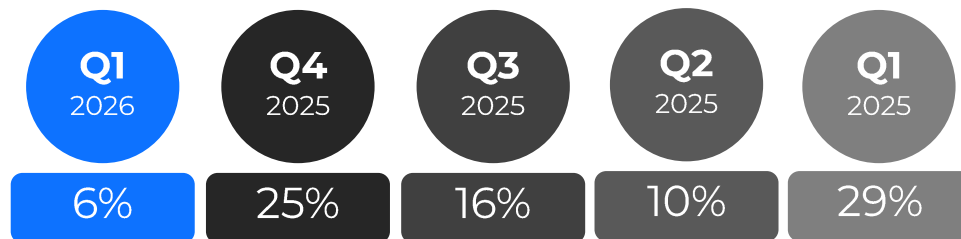
Keyakinan terhadap pemerintah

base: semua, n= 387



■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin

NET Score



Masyarakat yang **(sangat) tidak yakin** dengan pemerintahan secara signifikan adalah mereka yang tinggal di perkotaan (38%) dan mereka yang tergolong SES A (51%).

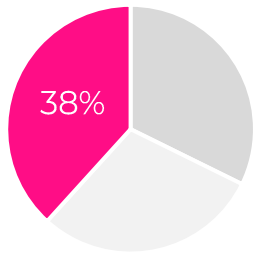
Masyarakat yang **agak yakin** dengan pemerintah secara signifikan dinilai oleh mereka dengan pendidikan SMP/SMA sederajat (31%) dan mereka yang tergolong SES B (33%).

Masyarakat yang **(sangat) yakin** terhadap pemerintahan secara signifikan adalah mereka yang tinggal di pedesaan (45%), mereka yang tergolong SES D (60%), dan pemilih Gerindra (50%) dan Golkar (45%).

Nice to know

Organisation for Economic CO-operation and Development **(OECD)** mencatat bahwa **keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pilar dari demokrasi** yang mampu mendorong diskursus dan partisipasi, ketegakan hukum, dan memfasilitasi reformasi.

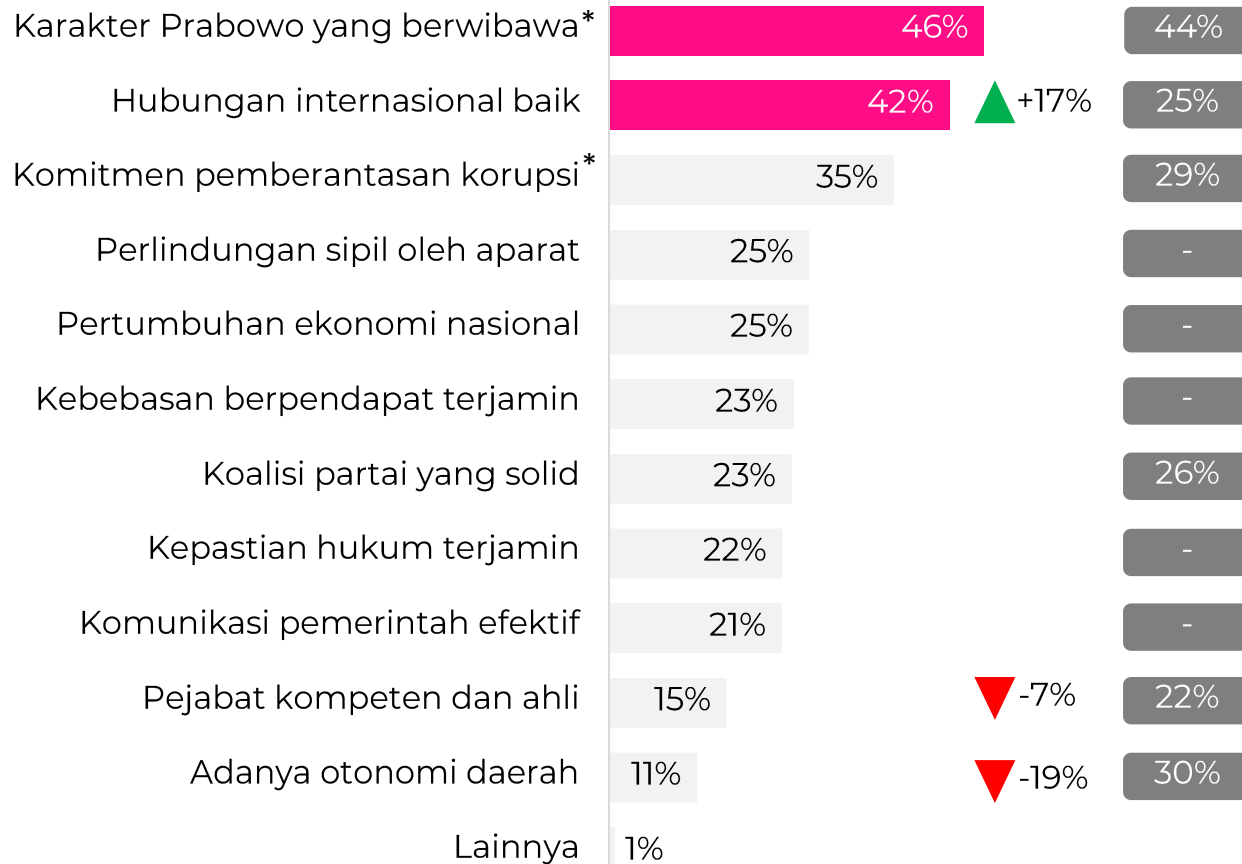
Di tengah penurunan keyakinan, citra dan karakter Prabowo (46%) menjadi penopang utama keyakinan masyarakat.



■ (Sangat) yakin

Alasan yakin terhadap pemerintahan

base: yakin, n= 148



Membaiknya ekonomi nasional dinilai sebagai faktor keyakinan secara signifikan oleh mereka yang memiliki pendidikan terakhir SMP/SMA sederajat (29%).

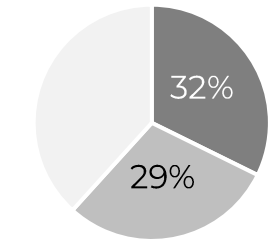
Hubungan baik dengan dunia internasional dinilai sebagai faktor keyakinan secara signifikan oleh mereka dengan kategori umur 35-44 (58%).

Karakter Prabowo yang tegas dan berwibawa menjadi faktor utama secara signifikan oleh mereka yang memilih Gerindra (64%) sebagai pilihan utama jika pemilu diadakan saat ini.

Nice to know

Masyarakat yakin atas pemberantasan korupsi dan karakter Prabowo sebagai alasan keyakinan terhadap pemerintah, **menilai karakter dan penegakan hukum yang tegas sebagai faktor penentu.**

Di sisi lain, maraknya korupsi pejabat terus menurunkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.



■ (Sangat) tidak yakin
■ Agak yakin

Alasan tidak yakin terhadap pemerintahan
base: tidak yakin, n= 239

Q1
2025

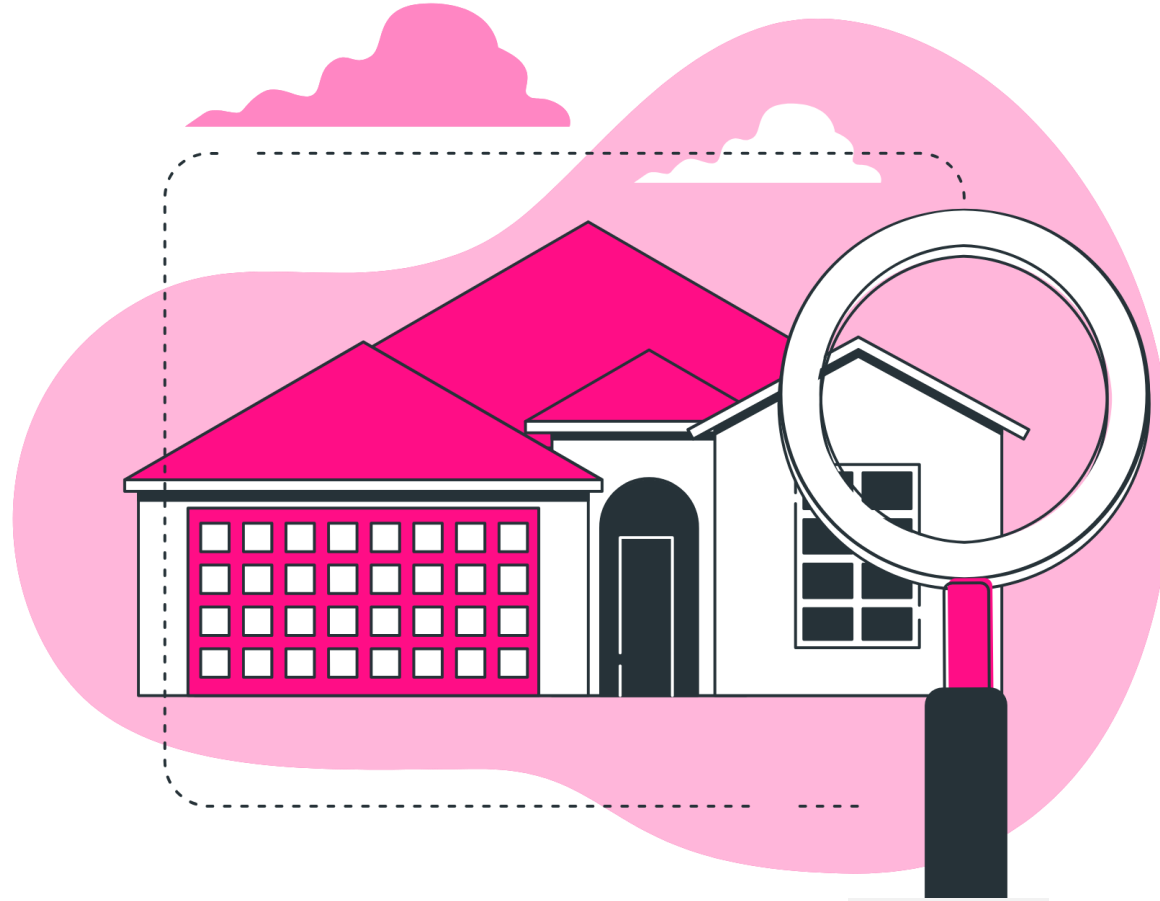
Maraknya korupsi oleh pejabat	56%	▲ +11%	45%
Pejabat kurang kompeten	43%		-
Perekonomian nasional memburuk	41%		-
Rendahnya kepastian hukum	33%		-
Maraknya kekerasan aparat negara	26%		-
Kebebasan berpendapat dibatasi	19%		25%
Komunikasi pemerintah buruk	18%		-
Kendali pusat terlalu dominan	15%	▼ -18%	33%
Karakter Prabowo yang emosional	13%		-
Minimnya pihak oposisi	13%		-
Hubungan internasional buruk	8%		8%
Tidak tahu	1%		

Maraknya korupsi menjadi faktor utama ketidakyakinan terhadap pemerintah, secara signifikan oleh pemilih Demokrat (62%).

Nice to know

Komisi Pemberantasan Korupsi (2026) mencatat **hampir 68% penyelenggara negara** atau pihak wajib lapor yang **belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** hingga 11 Maret 2026.

JP03 Seberapa yakin Anda bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memenuhi program-program tersebut?
JP04 Menurut Anda, faktor apa yang membuat pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan dapat menjalankan programnya dengan baik?



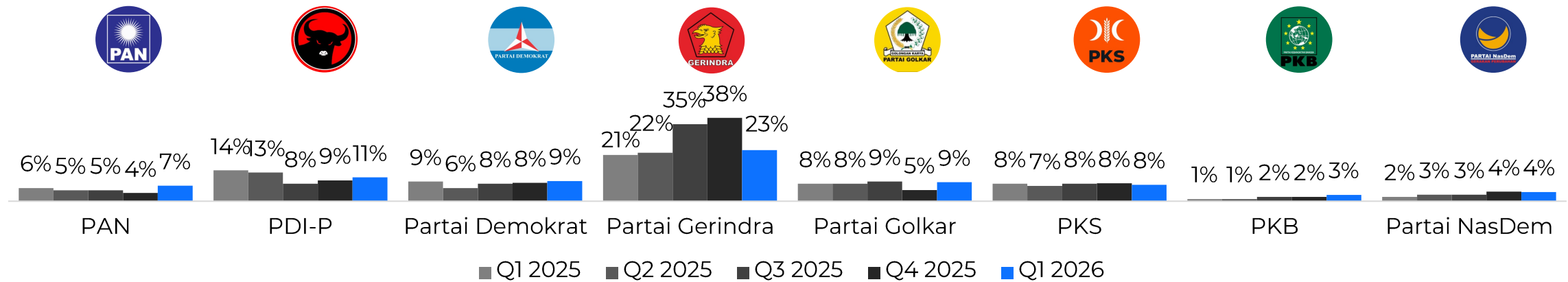
Sumber: Storyset

5 *Monitoring* Partai Politik

Penurunan suara Gerindra memutuskan tren kenaikan preferensi partai tersebut yang sempat konsisten sepanjang tahun 2025.

Preferensi Partai di Parlemen

base: semua, n= variasi

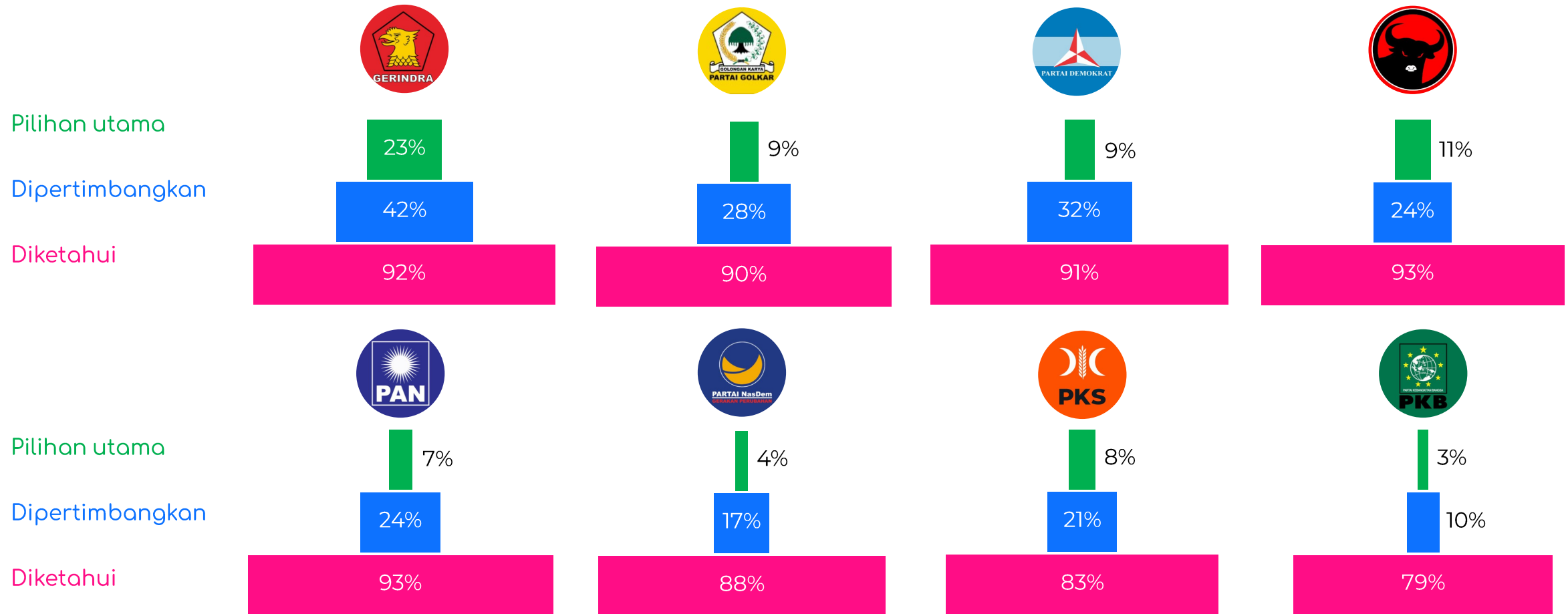


Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

PKB konsisten berada di bawah 4% sejak Q1 2025, yang membuat partai ini tidak dapat masuk ke parlemen jika pemilu diadakan hari ini.

Funnel Partai Politik di Parlemen*

base: semua, n= variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

* Cara membaca funnel partai politik terlampir di lampiran

Preferensi Partai Politik per Kuartal

Perbandingan Preferensi Partai Politik di Parlemen *base: semua, n= variasi*

Partai Politik	Diketahui					Dipertimbangkan					Pilihan Utama				
	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
Partai Gerindra	92%	93%	96%	95%	95%	42%	56%	56%	42%	50%	23%	38%	35%	22%	21%
Partai Golkar	90%	91%	92%	93%	86%	28%	26%	31%	23%	22%	9%	5%	9%	8%	8%
Partai Demokrat	91%	92%	92%	90%	89%	32%	30%	29%	20%	22%	9%	8%	8%	6%	9%
PDIP	93%	93%	96%	88%	95%	24%	24%	21%	21%	30%	11%	9%	8%	13%	14%
PAN	93%	93%	93%	86%	91%	24%	20%	23%	17%	23%	7%	4%	5%	5%	6%
Partai NasDem	88%	89%	91%	84%	88%	17%	15%	15%	11%	17%	4%	4%	3%	3%	2%
PKS	83%	86%	84%	81%	78%	21%	21%	8%	16%	20%	8%	8%	8%	7%	9%
PKB	79%	79%	77%	78%	76%	10%	10%	2%	5%	12%	3%	2%	2%	1%	1%

Naik signifikan dari kuartal sebelumnya

Turun signifikan dari kuartal sebelumnya

Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

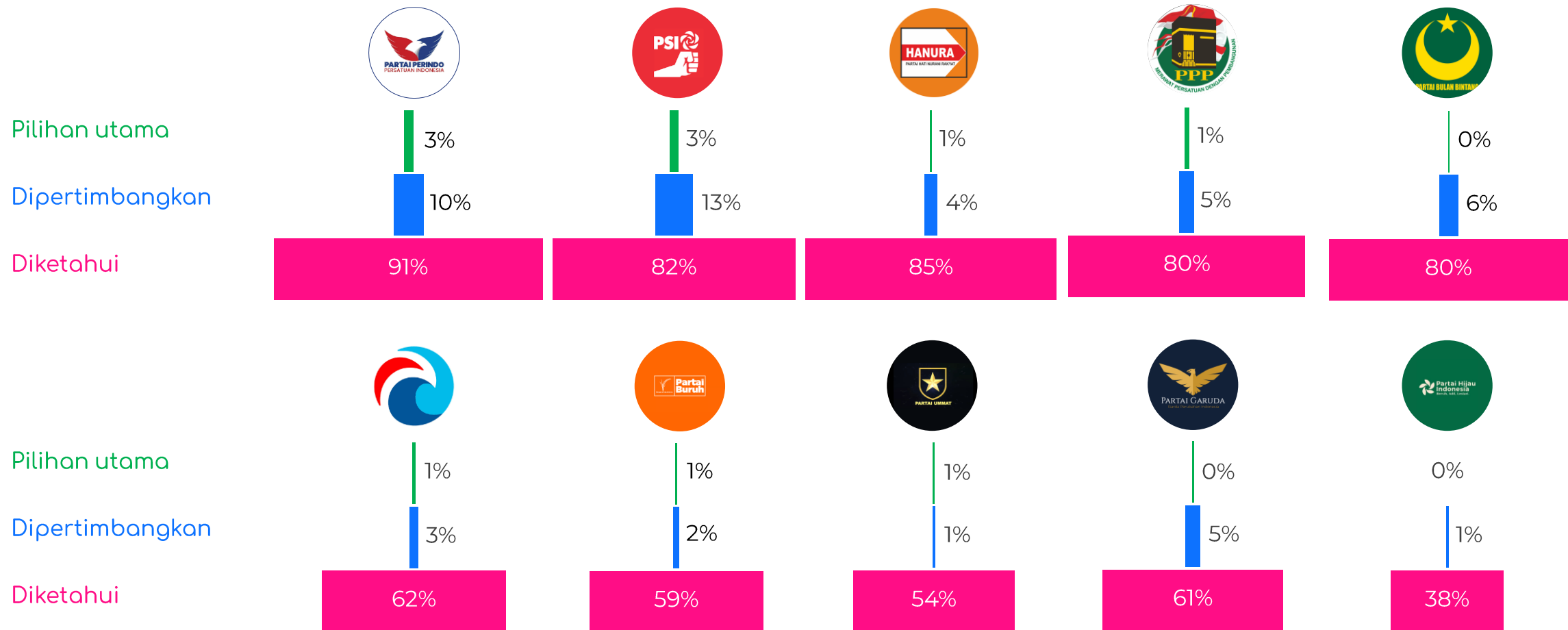
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, belum ada partai non-parlemen yang mampu lolos ke Senayan.

Funnel/Partai Politik Non-Parlemen*

base: semua, n= variasi

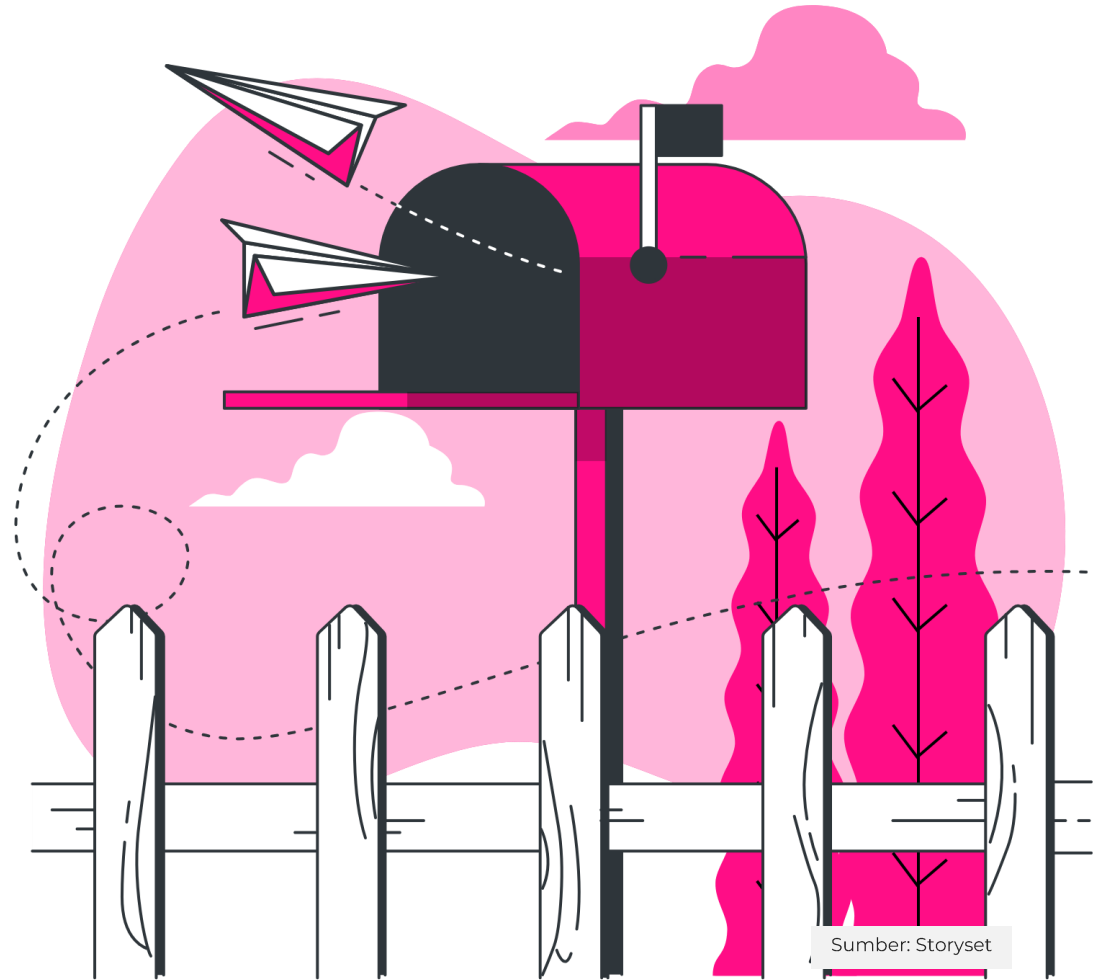


Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

* Cara membaca funnel partai politik terlampir di lampiran



6 Opini Masyarakat dalam RUU Berjalan

Secara umum, indeks skor partai politik pada Q1 2026 menunjukkan bahwa partai di parlemen belum sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat.

Indeks Partai Politik Parlemen*

base: semua, n= 387

Partai Politik	Skor Index Q1 2026	Skor Indeks Q4 2025	Skor Indeks Q3 2025	Skor Indeks Q2 2025	Skor Indeks Q1 2025
Partai Demokrat	33,9	20,5	42,0	37,8	35,5
Partai NasDem	23,1	23,8	28,6	37,8	61,0
PKB	29,8	30,8	39,1	37,6	61,0
PDIP	33,9	43,2	51,2	36,5	28,9
Partai Golkar	33,9	25,0	31,2	36,5	31,1
PKS	34,4	27,8	47,6	35,5	61,1
Partai Gerindra	34,8	25,0	47,6	31,7	46,2
PAN	27,3	20,8	41,9	27,9	35,6

Program Legislasi Nasional (Prolegnas)



Setiap undang-undang (UU) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melalui proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Proses pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

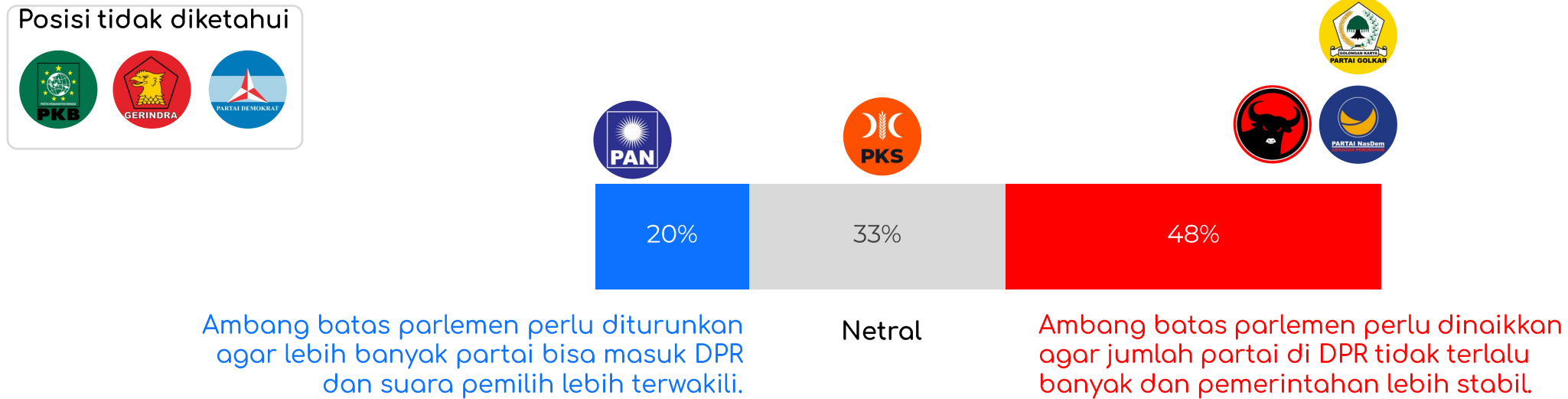
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sendiri **merupakan daftar rencana pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan program pembangunan nasional**. Prolegnas terbagi menjadi dua, yaitu Prolegnas Prioritas Tahunan dan Prolegnas Jangka Menengah. **Prolegnas menjadi acuan untuk daftar UU yang akan dibahas dalam satu atau lima tahun ke depan**. Oleh karena itu, pembahasan UU yang berjalan dalam satu dan lima tahun ke depan akan merujuk pada daftar yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Meskipun pembahasan UU harus mengacu pada daftar yang telah disepakati dalam Prolegnas, terdapat pengecualian untuk bisa memasukkan UU yang dianggap mendesak di luar daftar Prolegnas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3.

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dan Jangka Menengah sendiri harus disertai dengan adanya naskah akademik dan RUU, sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Setiap proses pembahasan RUU dalam Prolegnas perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Oleh karena itu, **keterbukaan informasi, akses publik terhadap dokumen pembahasan, serta ruang partisipasi yang inklusif menjadi prasyarat penting** dalam menjaga legitimasi dan kualitas pembentukan UU.

Di tengah ramainya perbincangan RUU Pemilu, partai di parlemen belum memiliki posisi yang jelas.

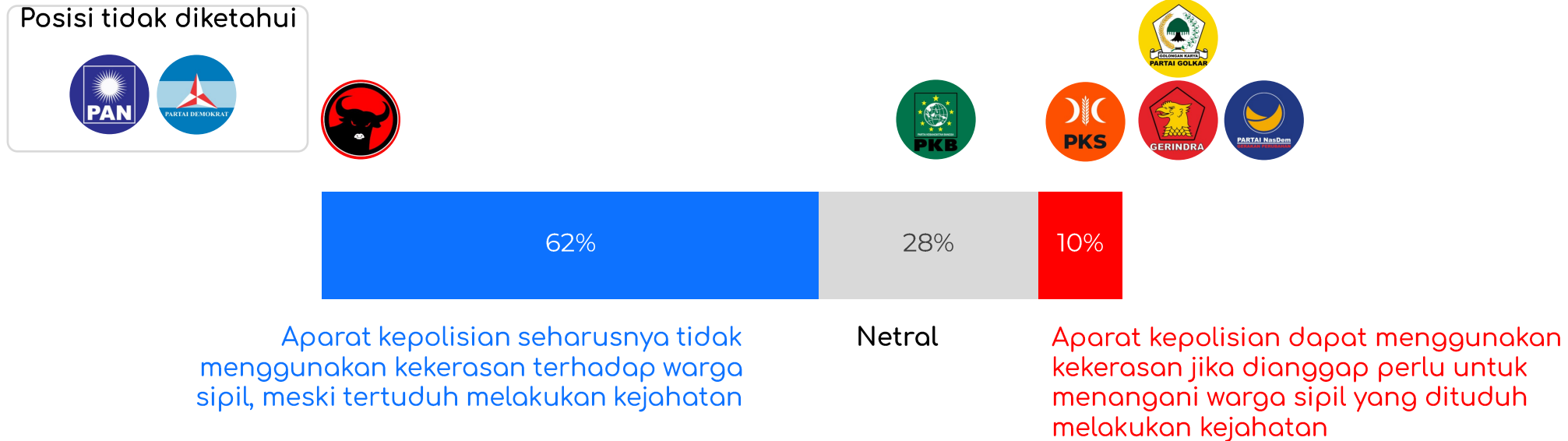


RUU Pemilu bertujuan memperbarui aturan pemilu yang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan ke depan, termasuk pemisahan jadwal pemilu, perbaikan sistem, serta memastikan pemilu tetap demokratis dan siap untuk 2029.

1. **Ambang batas parlemen:** terdapat wacana untuk mengubah ambang batas parlemen yang berpotensi meningkatkan stabilitas atau membuka sistem politik yang selama ini cenderung eksklusif
2. **Keserentakan Pemilu:** mengikuti Putusan MK, salah satu isu yang akan dibahas dalam RUU Pemilu adalah soal waktu pelaksanaan Pemilihan nasional dan daerah

RUU Pemilu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026.

Mayoritas masyarakat menilai bahwa kepolisian sudah seharusnya tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil.

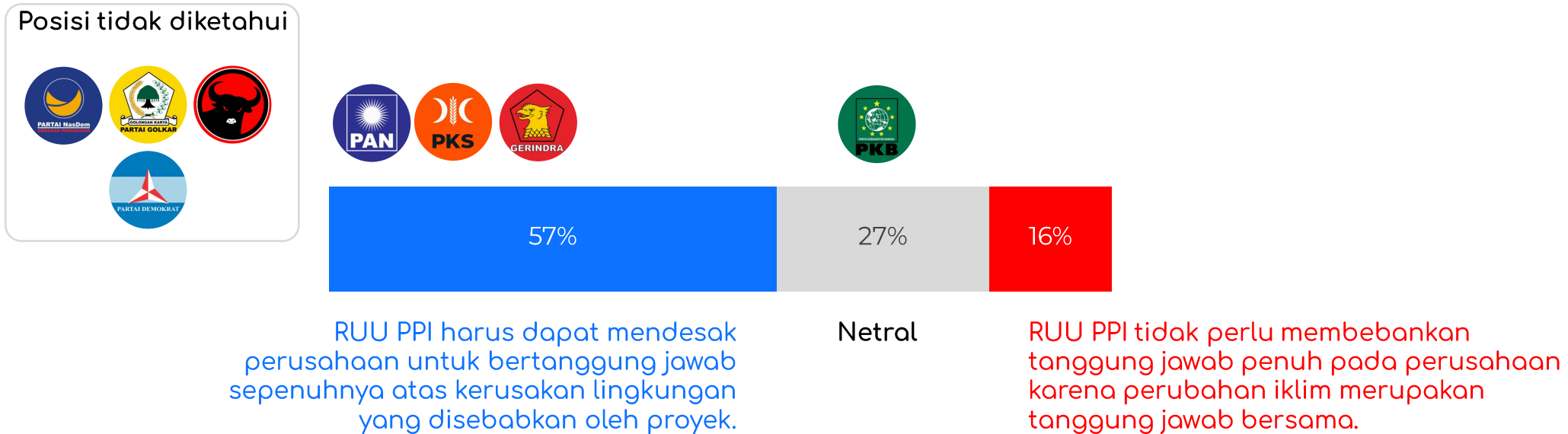


RUU Polri berfokus pada perluasan wewenang dan penataan ulang struktur Polri.

1. **Perpanjangan Usia Pensiun:** dinilai bisa mempertahankan SDM berpengalaman di posisi strategis, tetapi dikhawatirkan memperlambat regenerasi dan menambah penumpukan perwira tinggi.
2. **Kewenangan Penyadapan & Siber:** dianggap penting untuk menghadapi kejahatan siber dan terorisme, namun berpotensi mengancam privasi, kebebasan berekspresi, dan rawan disalahgunakan tanpa pengawasan jelas.

RUU Polri ini masih dalam tahap pembahasan, meski banyak pihak yang mengkritisi isi RUU tersebut.

6 dari 10 orang menganggap bahwa RUU Iklim harus dapat mendesak pertanggungjawaban perusahaan yang merusak lingkungan.

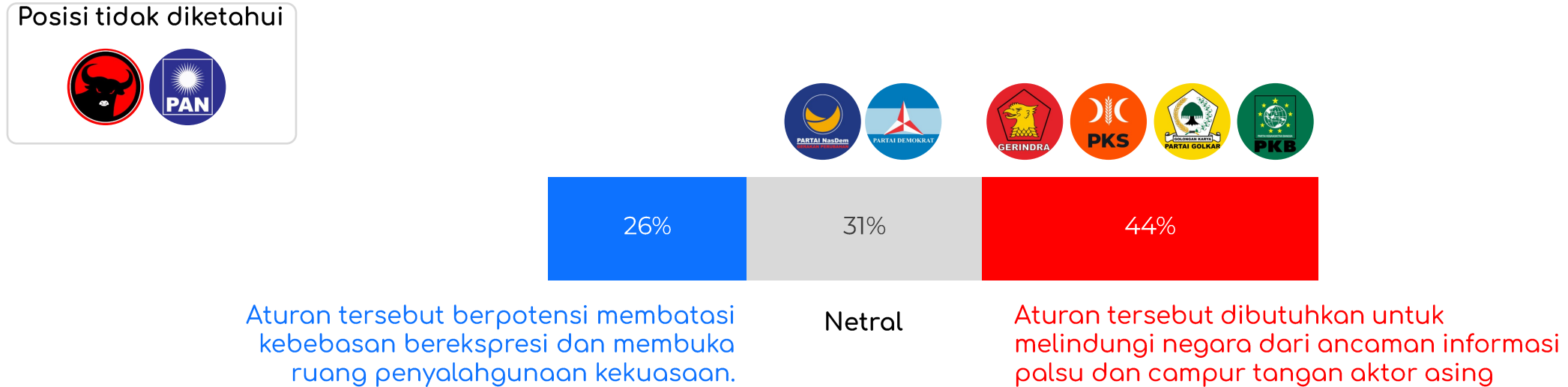


RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) adalah inisiatif legislasi penting yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim yang hingga saat ini kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terpisah-pisah.

- Menyatukan Arah Kebijakan Iklim:** dipandang dapat menjadi payung kebijakan terhadap pengelolaan terkait perubahan iklim yang hingga saat ini masih terpisah-pisah.
- Mencegah dan Mengelola Perubahan Iklim:** dianggap penting untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan upaya pencegahan dan pengelolaan atas dampak dari perubahan iklim.

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini sedang dibahas di dalam Badan Legislasi DPR RI dan diharapkan untuk dapat segera dirampungkan.

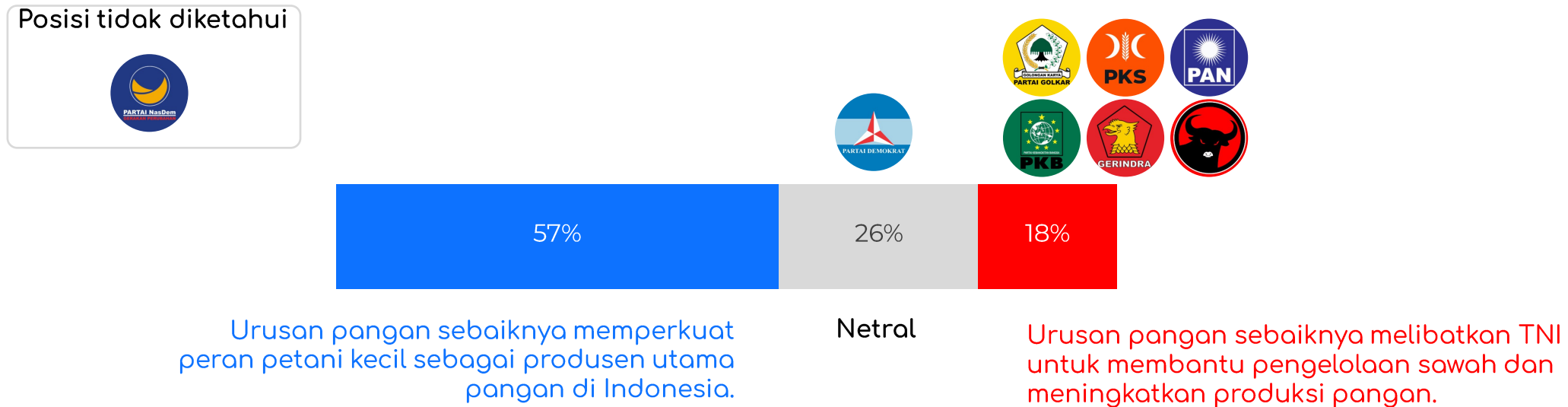
Perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap implikasi pengesahan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing pada masyarakat luas.



RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing (PDPA) diusulkan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman disinformasi digital secara lebih sistematis, dengan membedakan misinformasi dan disinformasi serta memperkuat ketahanan informasi dan kualitas demokrasi.

- Pembedaan misinformasi dan disinformasi:** Meski dibedakan secara konsep, ada kekhawatiran batas antara keduanya bisa ditafsirkan secara fleksibel dan berpotensi disalahgunakan
- Pengawasan ruang digital:** Perluasan kewenangan negara dalam memantau dan menindak konten digital dinilai rawan membuka ruang kontrol berlebihan terhadap informasi publik.
- Penanggulangan propaganda asing:** Narasi ancaman dari pihak asing bisa digunakan sebagai justifikasi untuk memperketat kontrol informasi, meskipun dampak nyatanya belum tentu jelas atau terukur.

Sebagian besar masyarakat menilai urusan pangan harus memperkuat peran petani, bukan melibatkan TNI dalam pengelolaan sawah.



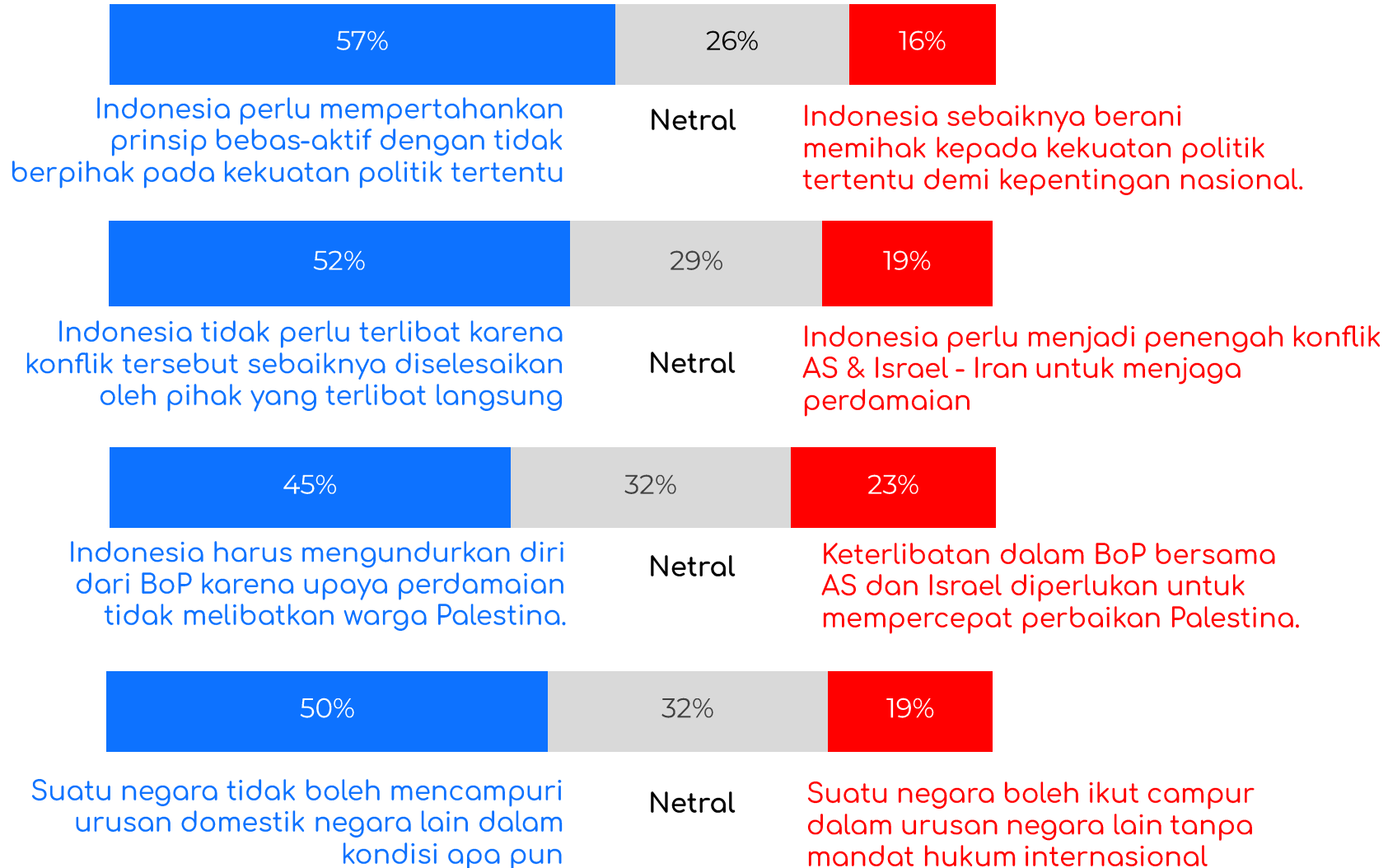
RUU Pangan berfokus pada penguatan kedaulatan dan kemandirian pangan melalui peran negara yang lebih besar dalam mengatur stok dan harga, penguatan kelembagaan seperti Bulog, serta perlindungan bagi petani dan nelayan sambil mendorong konsumsi pangan lokal.

1. **Kedaulatan Pangan:** Negara ingin lebih mandiri dalam pangan dengan mengatur stok dan harga tanpa bergantung pada impor.
2. **Peran Bulog:** Bulog akan diperkuat untuk mengontrol harga dan distribusi pangan, rawan disusupi unsur militer.
3. **Pangan Lokal:** Mendorong konsumsi makanan lokal dan melindungi lahan pertanian.
4. **Perlindungan Petani & Nelayan:** Menjaga kesejahteraan produsen sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.



7 Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Hubungan Internasional

Prinsip bebas aktif masih kuat dalam pandangan masyarakat terhadap arah diplomasi Indonesia.



Mereka yang tergolong SES C (56%), mereka yang sangat skeptis (65%) dan cukup skeptis (68%) secara signifikan menilai bahwa **Indonesia seharusnya mengundurkan diri dari BoP.**

Mereka yang berusia 17-24 tahun (59%) secara signifikan menilai suatu negara **tidak boleh ikut campur dalam urusan domestik negara lain.**

Masyarakat yang merasa bahwa **Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik luar negeri** secara signifikan adalah mereka yang tergolong SES C (66%).

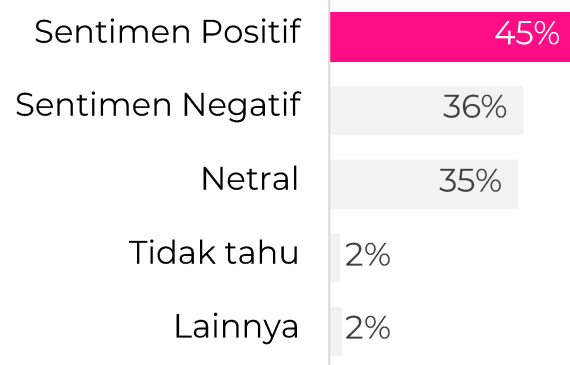
Nice to know

Pemerintahan Amerika Serikat **mendorong** negara **anggota Board of Peace untuk menyumbang** USD1 miliar atau sekitar **17 triliun rupiah** dalam keanggotaan organisasi Dewan Perdamaian tersebut.

Masyarakat mengasosiasikan kata "Israel" dan "Donald Trump" dengan sentimen negatif, sedangkan "Polri" dan "Prabowo" memiliki sentimen yang lebih beragam.

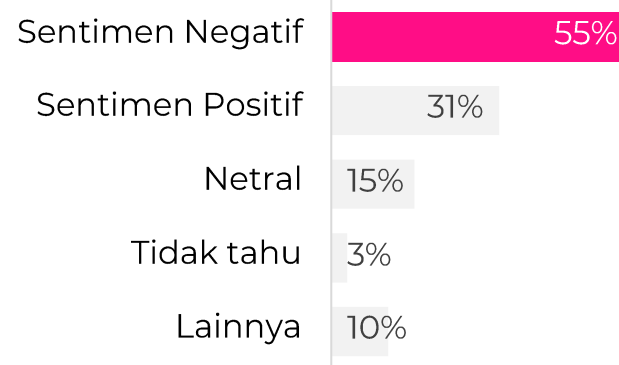
Asosiasi kata "Prabowo Subianto"

base: semua, n=387



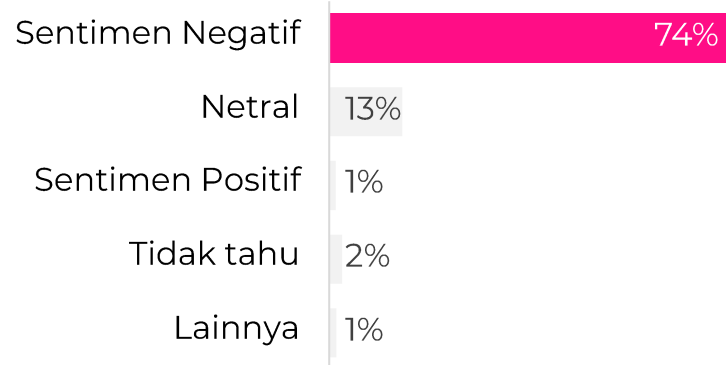
Asosiasi kata "Polri"

base: semua, n=387



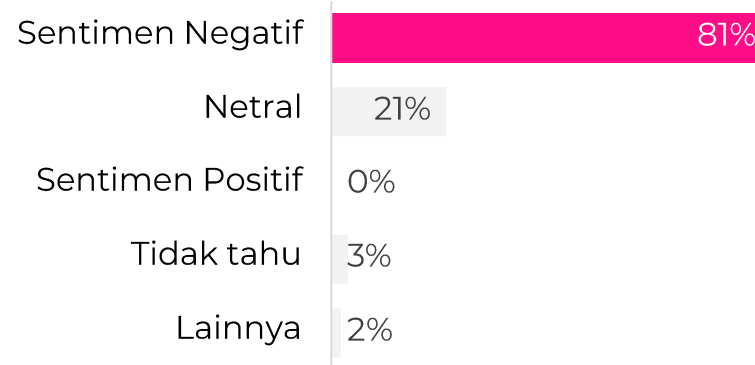
Asosiasi kata "Israel"

base: semua, n=387



Asosiasi kata "Donald Trump"

base: semua, n=387

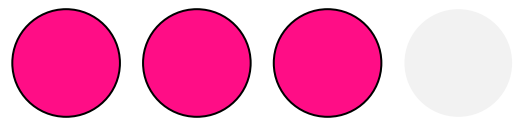


AK10 Apa kata pertama yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata "Israel"?

AK11 Apa kata pertama yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata "Donald Trump"?

AK12 Apa kata pertama yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata "Polri"?

AK13 Apa kata pertama yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata "Prabowo Subianto"?



Metodologi



Desain Penelitian

Tujuan



- Memahami sikap masyarakat terhadap:
- ✓ Isu terkini yang sedang berkembang.
 - ✓ Program dan kinerja pemerintah.
 - ✓ Prioritas isu untuk segera diselesaikan.
 - ✓ Beberapa RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional.
 - ✓ Hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Periode



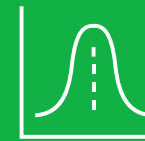
13 – 16 Maret 2026

Metode



Computer-Assisted Self Interviewing (CASI)
atau survei daring

Sampling



n = 387 responden*
Umur: 17 – 44 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden

base: all, n = 387*

Jenis kelamin

Perempuan	52%
Laki-laki	47%
Tidak mengatakan	1%

Umur

17 – 24 tahun	35%
25 – 34 tahun	40%
35 – 44 tahun	24%

Pendidikan

SMP/SMA	89%
Perguruan Tinggi	11%

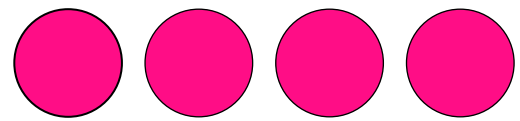
Wilayah

Sumatera	18%
Jawa	56%
Lainnya	26%

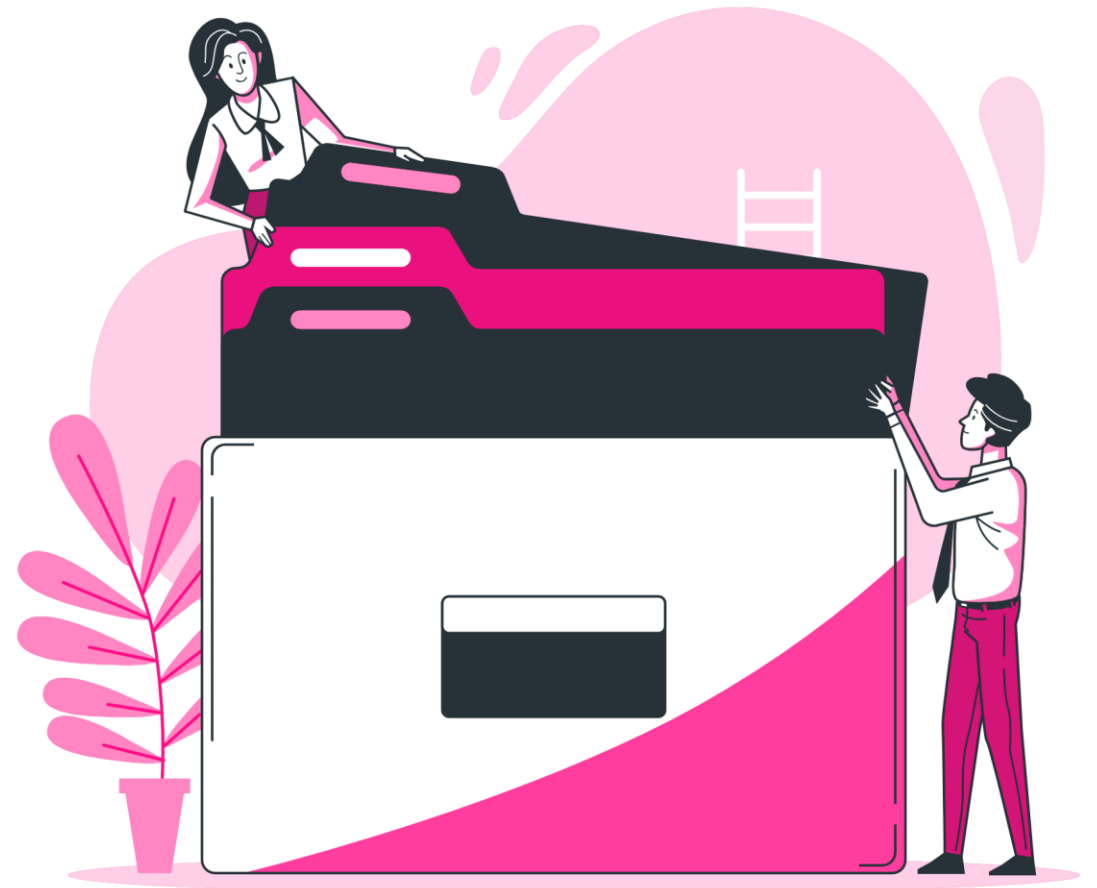
Area

Perkotaan	67%
Pedesaan	33%

**Untuk memastikan hasil yang representatif bagi Indonesia, data telah diberi bobot berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Agar "effective base" optimal, faktor bobot dibuat di bawah 2.*



Lampiran



Cara membaca laporan: *NET Score*

NET Score

Laporan Survei Nasional Kawula17 mencakup penilaian *NET score* yang digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

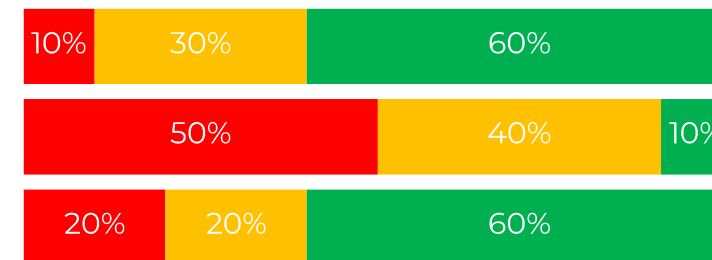
Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**

NET Score digunakan untuk memudahkan pembacaan arah opini masyarakat secara ringkas serta membandingkan perubahan penilaian antar isu, program, dan periode waktu.



Sumber: Storyset

Contoh:



■ (Sangat) tidak puas ■ Agak puas ■ (Sangat) puas

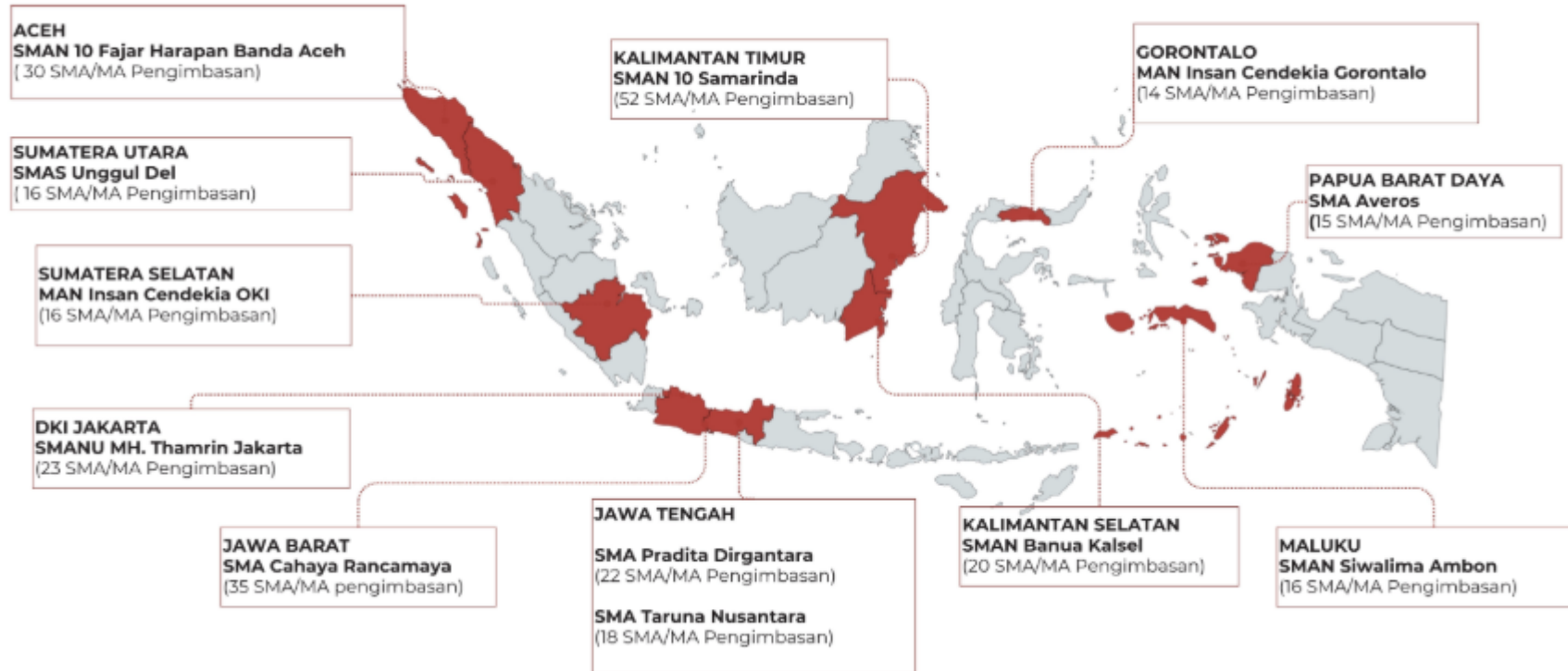
NET Score

50%

-40%

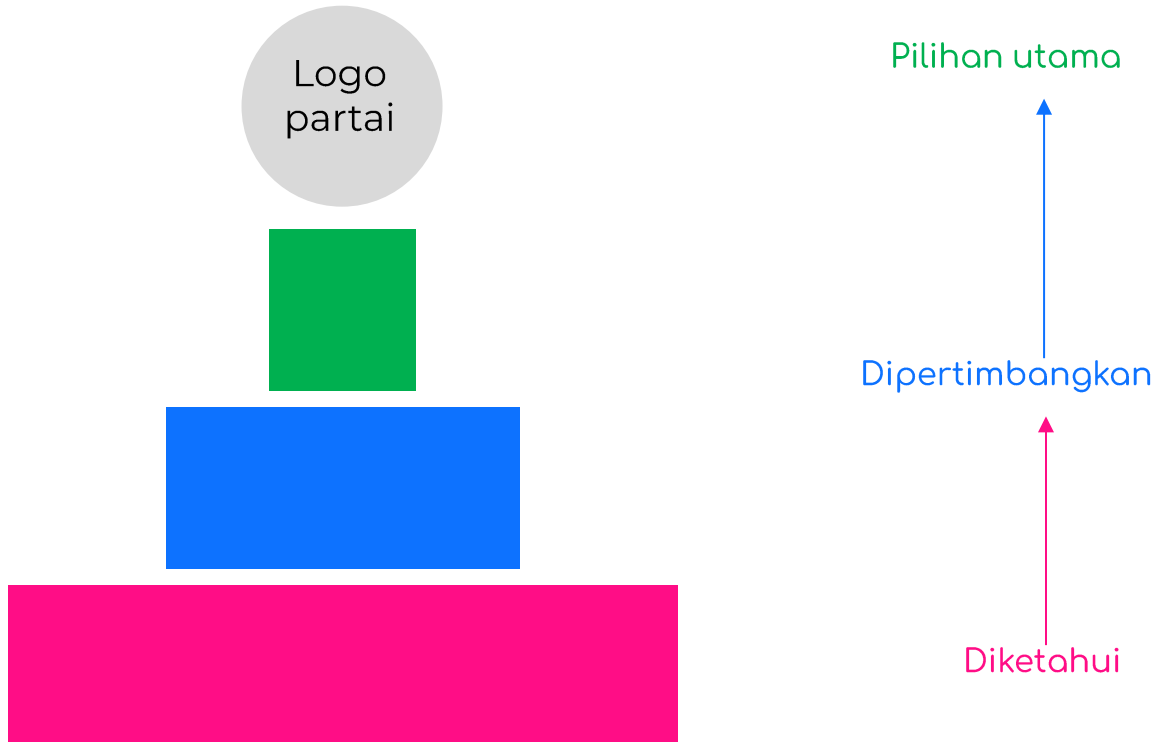
40%

Persebaran program Sekolah Unggul Garuda pada daerah rural



Salah satu program quick-win dengan tingkat kepuasan tinggi adalah program Sekolah Unggul Garuda yang secara signifikan dinilai (sangat) puas bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (54%).

Cara membaca *funnel* partai politik



Persentase responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Persentase responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q1 2026 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RUU Polri, RUU Pemilu, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, serta RUU Pangan.

